

**IMPLEMENTASI *COVID 19 ASIAN HATE CRIME ACT* DALAM
MENGATASI DISKRIMINASI KETURUNAN ASIA AMERIKA TAHUN**

2021-2023

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

PUTRI REGINA AYU WULANSARI

20323213

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2024

**IMPLEMENTASI COVID 19 ASIAN HATE CRIME ACT DALAM
MENGATASI DISKRIMINASI KETURUNAN ASIA AMERIKA TAHUN**

2021-2023

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

PUTRI REGINA AYU WULANSARI

20323213

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2024

HALAMAN PENGESAHAN
Implementasi Covid 19 Asian Hate Crime Act dalam Mengatasi
Diskriminasi Keturunan Asia Amerika Tahun 2021-2023

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia
Ketua Program Studi

Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

- 1 Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.
- 2 Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int., M.A.
- 3 Enggar Furi Herdianto, S.I.P., M.A.

Tanda Tangan





PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 20 Februari 2024



Putri Regina Ayu Wulansari

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR SINGKATAN	viii
ABSTRAK	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Cakupan penelitian	6
1.5 Tinjauan Pustaka	6
1.6 Kerangka Pemikiran	9
Bagan 1.6.1 Dampak Langsung dan Tidak Langsung Terhadap Implementasi dari George C. Edwards	11
1.7 Argumen Sementara	13
1.8 Metode Penelitian	14
<i>1.8.1 Jenis Penelitian</i>	14
<i>1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian</i>	14
<i>1.8.3 Metode Pengumpulan Data</i>	14
<i>1.8.4 Proses Penelitian</i>	15
1.9 Sistematika Pembahasan	15
BAB 2 KOMUNIKASI DAN SUMBER DAYA DALAM IMPLEMENTASI COVID 19 ASIAN HATE CRIME ACT	16
2.1. Komunikasi	17
2.2. Sumber Daya	23
BAB 3 DISPOSISI, BIROKRASI, DAN IMPLEMENTASI COVID 19 ASIAN HATE CRIME ACT	31
3.1. Disposisi	31
3.2. Birokrasi	41
3.3. Implementasi	48
BAB 4	52
4.1. Kesimpulan	52

4.1.1 Bagan Implementasi George C. Edwards III 1980	55
4.2 Rekomendasi	56
DAFTAR PUSTAKA	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.6.1 Dampak Langsung Terhadap Implementasi dari George C. Edwards.....	11
Gambar 4.1.1 Bagan Implementasi George C. Edwards.....	55

DAFTAR SINGKATAN

AS	: <i>Amerika Serikat</i>
AA	: <i>Asian American</i>
NHPI	: <i>Native Hawaiian and Pacific Islander</i>
DOJ	: <i>Department of Justice</i>
ED	: <i>Educational Department</i>
HHS	: <i>Health and Human Services</i>
CRS	: <i>Community Relation Services</i>
BJA	: <i>Bureau of Justice</i>
FBI	: <i>Federal Bureau of Investigation</i>
RUU	: <i>Rancangan Undang-undang</i>
UU	: <i>Undang Undang</i>
NIBRS	: <i>National Incident Based Reporting System</i>

ABSTRAK

Setelah kenaikan diskriminasi di Amerika Serikat yang ditujukan pada keturunan Asia Amerika karena terdapat pandemi Covid-19, upaya yang dilakukan Presiden Joe Biden setelah awal pelantikannya pada 2021 adalah mengentaskan masalah diskriminasi dengan menyetujui Rancangan *Covid 19 Asian Hate Crime Act* dan ditandatangani pada tanggal 20 Mei 2021. Melihat implementasi dari kebijakan tersebut, dijelaskan menggunakan teori implementasi kebijakan dari George C. Edwards III. Implementasi dari *Covid 19 Asian Hate Crime Act* dilihat dari empat faktor yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap para aktor) dan birokrasi. Pada pelaksanaan Implementasi kebijakannya, pertama melakukan komunikasi dengan departemen pelaksana yang terlibat, pemerintah. Lalu terdapat sumber daya manusia dan akses Informasi yang memberikan berita terkait dan cara pelaporan diskriminasi yang dapat diakses menggunakan 24 bahasa. Kemudian pada variabel disposisi, implementasi kebijakan dilihat dari contoh aktor federal seperti pemerintah negara bagian dalam upayanya mengimplementasikan kebijakan, lalu terdapat birokrasi yaitu standar operasional kerja dan faktor fragmentasi yang menjelaskan aktor yang bertanggung jawab pada pelaksanaan implementasi. Selanjutnya terdapat implementasi sebagai variabel akhir yang akan melihat hubungan dari empat variabel sebelumnya yang saling berkaitan satu sama lain. Pengesahan *Covid-19 Asian Hate Crime Act* sebagai langkah awal pemerintah dalam meminimalisir terjadinya diskriminasi di masa depan.

Kata-kata kunci: Diskriminasi keturunan Asia, Asia Amerika, Covid-19, UU Covid-19 Hate Crime, Amerika Serikat, Joe Biden.

After increasing discrimination in the United States aimed at Asian Americans due to the Covid-19 pandemic, efforts made by President Joe Biden after his inauguration in 2021 were to eradicate the problem of discrimination by approving the Draft Covid 19 Asian Hate Crime Act and signing it on May 20 2021 Looking at the implementation of this policy, explained using the theory of policy implementation from George C. Edwards III. The implementation of the Covid 19 Asian Hate Crime Act is seen from four factors, namely communication, resources, disposition (actors' attitudes) and bureaucracy. In implementing the policy, first communicate with the implementing department involved, the government. Then there are human resources and information access which provides related news and ways to report discrimination which can be accessed using 24 languages. Then in the disposition variable, policy implementation is seen from the example of federal actors such as state governments in their efforts to implement policies, then there is bureaucracy, namely work operational standards and fragmentation factors which explain the actors responsible for implementing implementation. Next, there is implementation as the final variable which will look at the relationship of the four previous variables which are related to each other. The ratification of the Covid-19 Asian Hate Crime Act is the government's first step in minimizing discrimination in the future.

Key words: Discrimination of Asian descent, Asian Americans, Covid-19, Covid-19 Hate Crime Law, United States, Joe Biden.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keturunan Asia Amerika tercatat pertama kali bermigrasi pada 1850, Amerika Serikat dipandang sebagai negara yang mempunyai keragaman ras dan etnis karena proses migrasi, keturunan Asia Amerika adalah salah satu ras yang mengalami pertumbuhan paling cepat daripada ras atau etnis lain, data menunjukkan populasi keturunan Asia Amerika mencapai 81% dari tahun 2000 hingga 2019, yang awalnya 10,5 juta menjadi 18, juta. Ras maupun etnis lain di Amerika Serikat juga mengalami kenaikan, di urutan kedua ada Hispanik yang pertumbuhannya mencapai 70% dari 35,6 juta menjadi 60,5 juta, lalu terdapat penduduk asli Hawaii yang meningkat hingga 60% dari 370 menjadi 596 orang, dan populasi kulit hitam yang meningkat 20% dari 34,4 juta menjadi 41,1 juta dan terakhir penduduk Amerika Serikat yang berkulit putih hanya mengalami pertumbuhan 1% dalam kurun waktu 10 tahun yaitu 195,7 juta - 197,3 juta (Budiman & G. Ruiz, 2021).

Pada tahun 2022, populasi keturunan Asia Amerika meningkat hingga 22,4 juta. Keturunan Asia Amerika tercatat pertama kali bermigrasi pada 1850 yang datang dari Tiongkok dan bekerja di tambang emas, namun seiring berjalannya waktu penduduk asia yang bermigrasi juga bekerja di sektor pertanian, pekerja pabrik, industri garmen, dan berkontribusi pada pembuatan kereta Api di wilayah Amerika bagian barat, dan kesuksesan buruh dari

Tiongkok tidak sedikit yang membuka usahanya sendiri (“Milestones: 1866–1898 - Office of the Historian”, n.d.).

Kehidupan sosial keturunan Asia Amerika menunjukkan beberapa fakta, seperti persentase lebih kecil untuk hidup dalam kemiskinan, mempunyai angka pendidikan yang tinggi, hal tersebut dikarenakan segi pendidikan keturunan Asia Amerika sangat berdedikasi untuk mendukung pendidikan anak-anaknya dan memandang pendidikan adalah investasi masa depan terbukti dengan 56% keturunan Asia Amerika memiliki gelar dari pada penduduk Amerika yang lain pada umur yang sama yaitu 25 tahun keatas, dan 72% orang keturunan Asia Amerika fasih berbahasa Inggris (Budiman & G. Ruiz, 2021), begitu juga dengan pengaruh politiknya yang tumbuh pesat kontribusinya dengan berpartisipasi dalam suara pemilu (Fish 2016).

Diskriminasi yang didapatkan oleh keturunan Asia Amerika tidak terlepas dengan penyebaran Covid-19, yang awal ditemukan pada akhir Desember 2019 di grosir pasar makanan laut Huanan di daerah Wuhan, provinsi Hubei. Di mana banyak pasien di sekitar kawasan tersebut yang menyebabkan penutupan pasar pada 1 Januari 2020 setelah adanya pengumuman dari pemegang kewenangan kesehatan setempat pada 31 Desember 2019 (Doucleff 2022)

Diskriminasi terhadap keturunan Asia di Amerika mulai mengalami kenaikan pada tahun 2020 di berbagai negara, di negara Amerika Serikat sendiri hampir 1900 korban telah dilaporkan ke AAPI dengan total 69% sebagai kekerasan verbal, lalu dengan kejahatan rasial yang melonjak karena kejadian 16 Maret 2020 setelah adanya label Kung Flu, dan Virus China di sosial media yang

diawali oleh mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Akibatnya terdapat kenaikan kejahatan rasial terhadap orang Asia hingga 145% di 16 kota besar Amerika Serikat (Han et al., 2023).

Julukan keturunan Asia Amerika di Amerika Serikat sendiri adalah orang asing abadi, terlepas dari status imigran serta generasi yang sudah lama tinggal di Amerika Serikat namun mereka yang mempunyai tampilan orang Asia dianggap sebagai orang asing. Stereotip yang sudah ada sejak lama, datang kembali selama krisis Covid-19, Salah satu contohnya adalah saat terjadinya wabah Pes pada abad 19 dimana orang kulit putih mengatakan jika wabah tersebut hanya menulari orang Asia (Simeon Man, 2020).

Tuduhan tersebut mengatakan bahwasanya keturunan Asia Amerika sebagai warga minoritas yang membawa penyakit, tidak sedikit pemicu signifikan datang dari lingkungan politik, di mana sekumpulan orang yang mempunyai banyak kekuasaan dan pengikut. Dengan adanya kekuatan tersebut secara langsung maupun tidak langsung, mendorong banyak orang melakukan tindakan rasisme dengan menggunakan kata anti China (Lantz & Wenger, 2023).

Mantan Presiden Amerika Serikat, yaitu Donald Trump melanggar pedoman WHO (*World Health Organization*) untuk tidak menggunakan letak geografis dalam merujuk sebuah asal suatu penyakit menular (Sandler 2020). Lalu Kongres mengeluarkan resolusi tidak mengikat pada September 2020 yang mengecam tindakan rasisme maupun menggunakan istilah virus Wuhan. Tetapi tindakan tersebut tidak disetujui oleh Partai Republik dengan jumlah 164 anggota menentang dan hanya 14 suara yang setuju (Chin, 2021).

Keterlambatan dalam menindaklanjuti masalah diskriminasi yang semakin naik berdampak pada pemerintahan yang baru, saat Presiden Joe Biden baru menjabat tepatnya pada 2021, terdapat peningkatan tindak diskriminasi hingga mencapai 339% (Yam, 2022). Sebagai presiden yang baru dilantik di tengah-tengah wabah virus Corona dan naiknya anti Asia di negaranya, Presiden Joe Biden dan wakil Presiden merilis strategi nasional pertama setelah pelantikannya, hal tersebut direncanakan untuk memajukan, menyetarakan dan memberi keadilan, serta peluang bagi komunitas seperti AAPI. Rencana yang tersusun terdiri dari rencana aksi yg disusun oleh 32 lembaga federal dan 15 kabinet eksekutif Presiden.

Upaya yang dilakukan dibersamai dengan investasi yang dibutuhkan untuk mendukung memerangi anti Asia, akses bahasa, serta pemilihan data untuk mengurangi adanya disegregasi data. Pada Mei 2021 Presiden Joe Biden menandatangani perintah eksekutif untuk memenuhi komitmennya dalam memajukan dan pengembangan, serta pemerataan keadilan dan peluang bagi komunitas AAPI (The White House, 2023). Meskipun sudah membuat strategi upaya dalam menekan angka diskriminasi, diskriminasi yang dilakukan kepada keturunan Asia Amerika masih belum berhenti, di mana terdapat laporan pada Maret 2021, terjadi 8 penembakan di Atlanta, dan 6 korbannya adalah wanita keturunan Asia Amerika (Reja 2021).

Untuk menanggapi diskriminasi terhadap orang Asia-Amerika, para pemimpin partai demokrat mengambil tindakan dengan merancang *Covid-19 Hate Crime Act* sebagai langkah penegakan hukum terhadap pelaku tindak

diskriminasi yang diperkenalkan oleh Grace Meng, DN.Y., dan Senator Mazie K. Hirono (Hirono 2021).

Presiden Joe Biden menandatangani RUU (Rancangan Undang-undang) yang disebut dengan *Covid-19 Hate Crime Act* pada 20 Mei 2021 (Vazquez 2021). Hal tersebut menarik untuk diteliti, karena dapat mengetahui implementasi serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan dari Undang-undang tersebut setelah disahkan.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana implementasi dari *Covid-19 Asian Hate Crime Act* setelah disahkan?

1.3 Tujuan Penelitian

Riset yang penulis teliti memiliki tujuan sebagai berikut, yaitu:

1. Tujuan yang pertama dalam riset yang akan diteliti oleh penulis adalah menganalisis bagaimana upaya dari kebijakan pemerintah Amerika Serikat di bawah Presiden Joe Biden dalam mengatasi diskriminasi yang dialami oleh keturunan Asia Amerika di Amerika Serikat karena dampak dari meningkatnya Covid 19.
2. Kemudian tujuan yang kedua adalah untuk mengetahui mengenai proses implementasi kebijakan dari *Covid- 19 Asian Hate Crime Act*. dari 2021 hingga 2023.
3. Kemudian tujuan yang ketiga adalah mengetahui aktor yang terlibat dalam proses implementasi *Covid 19 Asian Hate Crime Act*. dan mengetahui

hambatan yang dihadapi selama implementasi kebijakan dan proses menyelesaikan hambatan tersebut.

1.4 Cakupan penelitian

Penelitian yang akan penulis teliti menjelaskan sejarah diskriminasi keturunan Asia di Amerika Serikat secara singkat, kemudian menjelaskan adanya kenaikan diskriminasi keturunan Asia Amerika saat pandemi Covid-19, karena adanya hal tersebut terdapat proses terbentuknya RUU *Covid-19 Asian Hate Crime* hingga disahkan menjadi UU, lalu menjelaskan mengenai implementasi dari *Covid-19 Asian Hate Crime Act*. Alasan selanjutnya mengapa penulis meneliti dari 2021 adalah karena adanya gelombang anti Asia atau diskriminasi terhadap keturunan Asia Amerika, membuat pemerintah Amerika Serikat mengesahkan RUU *Covid-19 Asian Hate Crime* pada 2021, dimana setelah pengesahan *Covid 19 Asian hate crime Act* penulis melihat kebijakan tersebut dijalankan dari 2021 hingga 2023.

1.5 Tinjauan Pustaka

Jurnal pertama dari Hannah Tessler, Meera Choi, Grace Kao yang berjudul “*The Anxiety of Being Asian American: Hate Crimes and Negative Biases During the COVID-19 Pandemic*” menjelaskan mengenai bagaimana keturunan Asia Amerika mendapatkan diskriminasi di Amerika Serikat. Terdapat juga penjelasan yang berkaitan mengenai pandangan orang Amerika Serikat terhadap keturunan Asia Amerika mempunyai julukan sebagai bahaya kuning, yang populer dari abad

19 hingga pertengahan abad 20, dan berlanjut pada abad 21 (Tessler, Choi, and Kao 2020).

Tessler menjelaskan mengenai kesenjangan masyarakat di Amerika Serikat karena pandemi, ditambah dengan adanya xenophobia dan rasisme, ancaman pada resiko pekerjaan keturunan Asia Amerika datang ditambah dengan beberapa faktor seperti pekerjaan, yang mana seperti bekerja di bidang kesehatan, ekspor impor, dan publik yang membuat mereka berinteraksi dengan banyak masyarakat membuat kemungkinan tertular virus Covid-19 semakin meningkat (Tessler, Choi, and Kao 2020).

Jurnal dari Qian he dan Yu Xie dengan judul *‘The moral filter of patriotic prejudice: How Americans view Chinese in the Covid 19’* eramelihat dari sisi persepsi orang Amerika Serikat dalam memandang dan melihat orang Asia, terutama keturunan Tiongkok, serta melihat pandangan orang Amerika Serikat terhadap Tiongkok saat pergeseran hubungan Tiongkok dan Amerika Serikat selama pandemi Covid-19 (He and Xie 2022).

Orang Amerika merasa bahwa orang Tiongkok lebih mengancam daripada keturunan Asia lainnya, lalu mengelompokkannya sebagai orang yang kurang dapat dipercaya dan menghomogenkan bahwasanya keturunan Asia Timur adalah kelompok luar, dapat diketahui dari pernyataan tersebut variabel hubungan antara ancaman kepentingan nasional yang dirasakan dan prasangka berbasis kebangsaan oleh masyarakat Amerika Serikat. Serta menjelaskan juga mengenai bagaimana wilayah-wilayah Demokrat dan Republik dalam melihat keturunan Asia Amerika terutama dari Tiongkok. Hal tersebut diakibatkan dari adanya pengabaian hubungan antara sentimen Anti Asia dengan memanasnya geopolitik Amerika dan

Tiongkok, serta politik domestik Amerika Serikat. Adanya penekanan bahwasanya kebencian yang menargetkan keturunan Asia Amerika karena asal dari virus Corona dengan tujuan pembahasannya yaitu prasangka berbasis kebangsaan (He and Xie 2022).

Jurnal dari C. Aujean Lee dan John C. Arroyo, dengan judul "*A Typology of Local and State Government Responses to Racism: A Case of Anti-Asian Hate in the COVID-19 Pandemic*" membahas mengenai tanggapan pemerintahan daerah dan negara bagian Amerika Serikat dalam kasus diskriminasi terhadap keturunan Asia Amerika selama pandemi, kemudian membantu melihat respon dan tanggapan pemerintah untuk menindaklanjuti kasus diskriminasi dari awal adanya pandemi hingga pergantian Presiden Donald Trump ke Presiden Joe Biden (Lee and Arroyo 2022).

Aujean Lee, mengumpulkan data awal beberapa bulan setelah munculnya pandemi dan melihat reaksi awal pemerintah negara bagian dan kota dalam menanggapi diskriminasi tersebut. Dimana temuan tersebut mengindikasikan kepasifan dari menanggapi penanganan diskriminasi saat pandemi. Serta kebanyakan menghindari topik ras, kemudian tidak ada tindak lanjut untuk mencegah atau melindungi penduduk yang mendapatkan kekerasan (Lee and Arroyo 2022).

Jurnal yang ditulis oleh Justin T, Huang, Masha Krupenkin, David Rothschild, dan Julia Lee Cunningham, dengan judul "*The cost of anti-Asian racism during the COVID-19 pandemic*" berkaitan dengan dampak ekonomi yang dirasakan oleh orang Asia karena rasisme yang didapat, dimana fokus penelitiannya adalah penurunan pemasukan terhadap restoran Asia selama

Pandemi Covid-19, dimana diskriminasi paling menonjol dilakukan terhadap restoran yang mempunyai masakan khas etnik (Huang et al. 2022).

Huang mengatakan diskriminasi yang dilakukan konsumen berdampak negatif pada keberhasilan jalur usaha, terutama dalam masa sentimen terhadap asia. Pembahasan merujuk pada sejarah awal restoran Cina didirikan lalu terdapatnya Xenofobia dengan mengatakan jika makanan lezat Cina terbuat dari ular dan tikus. Di mana ditemukan bahwasanya menekankan asal mula dari Covid-19 dari Cina meningkatkan sentimen anti Asia serta perasaan takut terhadap orang Asia (Huang et al. 2022).

Dari 4 jurnal tersebut dapat menjadi pendukung penelitian penulis, tetapi belum ada yang menjelaskan mengenai implementasi dari *Covid-19 Asian Hate Crime Act*. Oleh sebab itu, penulis dapat menganalisa lebih dalam untuk melengkapi penelitian yang sudah ada sebelumnya.

1.6 Kerangka Pemikiran

Teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III dalam bukunya "*Implementing Public Policy*" tahun 1980 menjelaskan jika implementasi kebijakan adalah hal penting, karena jika tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik dalam implementasinya maka tujuan dari kebijakan publik tersebut tidak akan terwujud. Oleh sebab itu dalam bukunya Edwards menulis terdapat empat variabel dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap), dan struktur birokrasi (Edwards 1980).

Variabel pertama adalah komunikasi, implementasi suatu kebijakan yang dilakukan harus akurat dan dapat dipahami, oleh karena itu selain arahannya harus

diikuti dengan baik, suatu komunikasi juga harus jelas karena menentukan keberhasilan dari pencapaian implementasi suatu kebijakan (Edwards 1980). Komunikasi sebagai faktor yang menentukan implementasi suatu kebijakan menjadi persyaratan awal di mana pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan suatu kebijakan dapat mengetahui tindakan yang akan dilakukan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut (Edwards 1980)

Selanjutnya terdapat faktor sumber daya, jika kekurangan sumber daya dalam mengimplementasikan kebijakan, maka kemungkinan besar implementasi kebijakan tersebut tidak efektif. Jika dalam komunikasi sudah terdapat perintah yang disampaikan secara jelas, akurat, dan konsisten, hal tersebut masih belum sempurna jika dalam menjalankan kebijakan masih kekurangan sumber daya. Karena kemungkinan besarnya adalah implementasi kebijakan tersebut kurang efektif (Edwards 1980).

Sumber daya juga bisa dalam bentuk fasilitas, di mana seorang staf yang cukup memahami dan mempunyai wewenang mengenai apa yang harus dilakukan, sumber daya fasilitas juga dapat dalam bentuk bangunan, peralatan, perlengkapan, dan area ruang hijau untuk mendukung berjalannya pekerjaan dari aktor (Edwards 1980). Sumber daya informasi diperlukan untuk menjalankan suatu kebijakan, para pelaksana perlu mengetahui apa yang harus dilakukan serta data kepatuhan pada peraturan dan regulasi pemerintah (Edward, 1980).

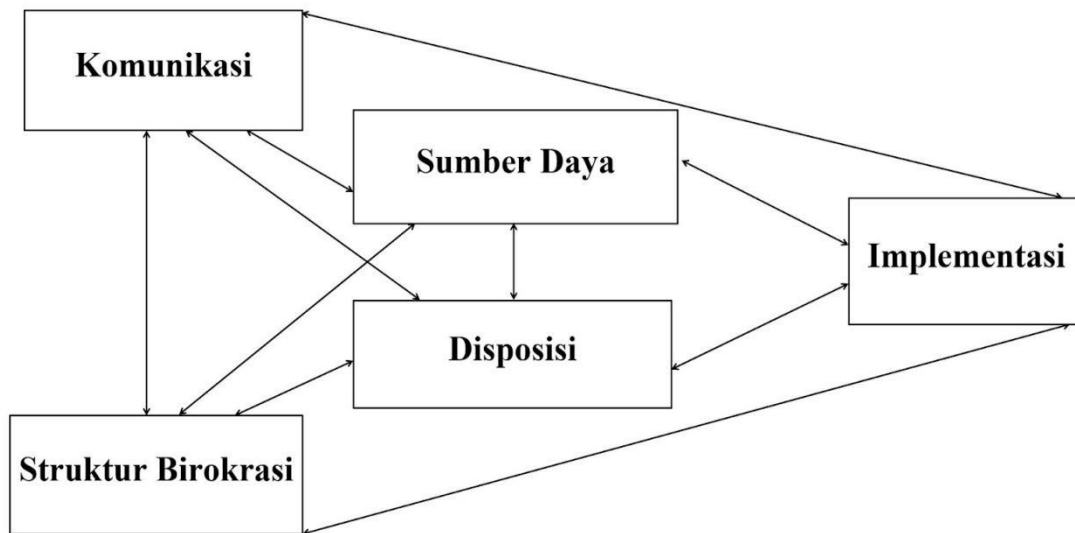
Ketiga disposisi atau sikap para pelaksana, Edwards mengatakan jika para pelaksana mempunyai kecenderungan yang baik pada kebijakan tertentu maka implementasinya akan semakin baik, begitu juga sebaliknya jika pelaksana mempunyai arah pemikiran dan sikap yang berbeda maka akan sulit (Edwards

1980:89). Karena pada zona disposisi juga terdapat efek ketidakpedulian, para pelaksananya tidak mempunyai perasaan kuat terhadap kebijakan tersebut. Pada kasus seperti itu para pelaksana membuat implementasi kebijakannya yang secara tidak langsung menghambat proses berjalannya (Edwards 1980).

Keempat adalah Struktur birokrasi, dua karakter birokrasi adalah SOP (standard operational procedure) diperlukan karena dapat membantu membuat keputusan, menurut Edwards SOP digunakan untuk menangani situasi yang terjadi selama implementasi yang dapat memberikan fleksibilitas kepada aktor, karena menghemat waktu dalam membuat keputusan dengan menggunakan jalan pintas agar suatu kebijakan dapat diimplementasikan (Edwards 1980).

Poin kedua adalah fragmentasi, yaitu penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan pada unit-unit yang diberikan tanggung jawab (Edwards 1980). Lalu yang terakhir adalah implementasi, yang akan memeriksa secara eksplisit terhadap apa yang tersirat pada empat variabel sebelumnya, karena setiap struktur saling mempengaruhi satu sama lain (Edwards 1980).

Bagan 1.6.1 Dampak Langsung dan Tidak Langsung Terhadap Implementasi dari George C. Edwards



Sumber: George C. Edwards III (1980:148)

Implementasi komunikasi dari *Covid-19 Asian Hate Crime Act* pelaksanaannya adalah pemerintah Amerika Serikat yang memberi wewenang kepada DOJ (*Department of Justice*) yang mana sasarannya adalah masyarakat. Untuk itu DOJ memberikan arahan panduan kepada penegak hukum negara bagian, lokal, dan suku. Sosialisasi komunikasi juga dilakukan yaitu kampanye pendidikan publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Dalam upaya perluasan komunikasi, DOJ sebagai penanggung jawab melakukannya dengan berbagai bahasa. Lalu adanya rancangan panduan pedoman implementasi kebijakan dari DOJ dan HHS (*Department of Health and Human Services*).

Dalam Sumber daya terdapat DOJ, CRS, HHS, ED, dan gubernur negara bagian, lalu sumber daya informasi DOJ membuat perangkat online yaitu layanan untuk penuntut online yang melakukan tuntutan, situs website menyediakan informasi terkait kejahatan rasial bagi penegak hukum, peneliti, korban, dan

kelompok advokasi, yang dapat diakses ke empat bahasa yang sering digunakan (Korea, Tagalog, Tiongkok, Jepang, dan Vietnam). Lalu terakhir tersedianya fasilitas yang menunjang implementasi kebijakan.

Disposisi menjelaskan mengenai sikap dan dukungan dari pelaksana, disini menyoroti komitmen dari pemerintah negara bagian dalam mengimplementasikan kebijakan. Birokrasi membahas SOP mengenai penanganan untuk situasi yang terjadi, oleh karena itu penulis melihat melalui struktur langkah yang diambil oleh para aktor dan cara mengatasi hambatan saat menjalankan kebijakan. Kedua fragmentasi yaitu penyebaran tanggung jawab implementasi kebijakan. Terakhir implementasi, melihat hubungan saling berkaitannya empat variabel sebelumnya yang akan mempengaruhi implementasi.

1.7 Argumen Sementara

Implementasi kebijakan berjalan dengan baik jika memenuhi empat variabel, jika dalam proses implementasinya tidak dipersiapkan dengan baik, apa yang akan jadi tujuan kebijakan tidak tercapai. Tujuannya adalah mengurangi angka diskriminasi pada keturunan Asia Amerika. Variabel komunikasi dimulai dengan arahan dari pemerintah Amerika Serikat yang memberi tanggung jawab kepada DOJ lalu dalam sumber daya terdapat DOJ, CRS, HHS, ED, dan Gubernur negara bagian, sumber daya informasi DOJ membuat perangkat online yaitu penyedia informasi dan layanan pelaporan. Disposisi sikap dari pelaksana yang menjalankan kebijakan dan birokrasi yaitu SOP langkah yang diambil aktor dalam menghadapi implementasi kebijakan, Fragmentasi menjelaskan aktor yang bertanggung dalam implementasi dan pelaporan kebijakan tersebut. Terakhir

implementasi menjelaskan hubungan saling mempengaruhi dari empat variabel sebelumnya yang mempengaruhi implementasi kebijakan.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian kualitatif, dimana tidak menggunakan angka dan variabel dimana isinya mengumpulkan data-data yang dilihat berdasarkan fakta-fakta dari berbagai macam persoalan dan permasalahan sosial yang akan menghasilkan sebuah kajian (Wibisono, 2019).

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek yang diteliti Amerika Serikat, dimana objeknya adalah *Covid-19 Asian Hate Crime Act*.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data-data yang dikumpulkan dan ditulis sebelumnya oleh orang lain (Serra et al., 2018). Data sekunder tersebut seperti jurnal, *website* resmi pemerintah Amerika Serikat, arsip kongres, pidato kongres, dan *website* DOJ (*Department of Justice*). Namun penelitian ini mempunyai keterbatasan dalam pengumpulan data statistik *Asian hate crime* di setiap negara bagian, adanya pergantian pelaporan tahunan ke sistem NIBRS (*National Incident Based Reporting Systems*) dari UCR (*Uniform Crime Reporting*) yang menyebabkan hampir 40% Lembaga Penegak Hukum gagal melaporkan data kejahatan diskriminasi (Li et al. 2022).

1.8.4 Proses Penelitian

Penulis melakukan pengumpulan data melalui sumber-sumber dari berbagai jurnal dan internet, setelah mendapatkan topik yang akan penulis bahas, penulis melanjutkan untuk mengumpulkan berbagai referensi data dari jurnal, buku, dan sumber-sumber dari media online dapat membantu dalam pengembangan topik serta memberitahu penulis untuk memasukan data aktual.

1.9 Sistematika Pembahasan

Bab 1 memaparkan latar belakang masalah dan rumusan masalah, yang menjadi ukuran sejauh mana penelitian dilakukan serta tujuan dari adanya penelitian tersebut. Lalu terdapat rujukan dari jurnal pada tinjauan pustaka yang membantu penulis dalam melakukan penelitian, dan terakhir adanya sistematika pembahasan akhir. Bab II membahas mengenai faktor yang dapat mempengaruhi implementasi *Covid 19 Asian Hate Crime Act* (Komunikasi dan Sumber Daya). Lalu Bab III membahas mengenai faktor (Disposisi dan Birokrasi) dan Hasil dari implementasi *Covid-19 Asian Hate Crime Act* dari 2021 hingga 2023. Kemudian Bab IV memuat kesimpulan dari apa yang sudah dibahas dan rekomendasi untuk peneliti selanjutnya.

BAB 2

KOMUNIKASI DAN SUMBER DAYA DALAM IMPLEMENTASI *COVID 19 ASIAN HATE CRIME ACT*

Setelah adanya kenaikan angka diskriminasi pada keturunan Asia Amerika saat pandemi Covid 19, Presiden Joe Biden yang baru dilantik di tahun 2021 membuat kebijakan untuk mengatasi kejahatan diskriminasi. Salah satunya adalah mengesahkan *Covid 19 Asian Hate Crime Act* yang ditandatangani pada 20 Mei 2021 (Vazquez 2021).

Kondisi keturunan Asia Amerika selama terjadinya pandemi Covid 19 mengingatkan kembali bahwasanya keturunan Asia Amerika dipandang sebagai orang asing. Masyarakat Amerika Serikat mempunyai pandangan negatif terhadap pandemi Covid 19 yang datang dari luar, kemudian mengatakan jika keturunan Asia Amerika sebagai penyebar virus Corona. Pandangan tersebut merugikan keturunan Asia Amerika karena selain mempunyai resiko yang sama yaitu tertular virus Corona, keturunan Asia Amerika juga harus waspada terhadap ancaman keselamatan dan kesehatan jasmani maupun kesehatan mental (Tessler, Choi, and Kao 2020).

Oleh sebab itu dengan adanya pengesahan terhadap *Covid 19 Asian Hate Crime Act pada 20 Mei 2021* tersebut tentunya terdapat upaya implementasi kebijakan yang dilakukan pemerintah. Sejalan dengan alur tersebut penulis menggunakan model implementasi kebijakan publik dari Edwards 1980 yang mempunyai empat variabel yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan

birokrasi untuk menjawab pelaksanaan implementasi kebijakan, pada bab dua penulis akan menjelaskan variabel komunikasi dan sumber daya.

2.1. Komunikasi

Komunikasi sebagai faktor yang menentukan implementasi suatu kebijakan menjadi persyaratan awal di mana pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan suatu kebijakan dapat mengetahui tindakan yang akan dilakukan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Untuk itu selain arahnya harus diikuti dengan baik, komunikasi juga harus jelas karena menentukan keberhasilan dari pencapaian implementasi suatu kebijakan (Edwards 1980).

Panduan yang terdapat dalam UU juga sudah menjelaskan apa yang harus dilaksanakan, untuk itu setelah pengesahan *Covid 19 Asian Hate Crime Act* Presiden Joe Biden memberikan wewenang pada DOJ (*Department of Justice*). Jaksa Agung Merrick Garland memberi pernyataan yang singkatnya menyatakan jika penandatanganan RUU tersebut merupakan langkah penting, di mana DOJ bangga karena mempunyai peran penting dalam berjalannya implementasi UU tersebut (Kaneya 2021).

Presiden Joe Biden membentuk inisiatif lembaga DOJ untuk mengatasi kekerasan yang akan mewujudkan implementasi kebijakan, dengan DOJ yang akan memberikan panduan lebih lanjut mengenai penerapan kebijakan, di mana DOJ akan bekerja sama dengan HHS (*Health and Human Services*) (The White House 2021). Oleh karena itu dalam faktor komunikasi, alur yang dapat mempengaruhi berjalannya suatu kebijakan dapat berupa penyaluran informasi

dan komunikasi, kejelasan dan konsistensi dari komunikasi tersebut dari pemerintah federal ke berbagai aktor yang terlibat.

Dalam implementasi *Covid 19 Asian Hate Crime Act* yang disahkan pada Mei 2021, terdapat poin bahwasanya pada bagian panduan yang menunjuk DOJ mengeluarkan panduan kepada lembaga penegak hukum negara bagian, lokal, dan suku. Kemudian membuat pelaporan online untuk tindak kejahatan serta pada penyandang disabilitas dengan fasilitas website yang menyediakan layananan berbagai bahasa, memperluas layanan pendidikan publik, kemudian DOJ dan akan menerbitkan panduan dimana tujuannya meningkatkan kesadaran masyarakat atas kejahatan rasial.

Dalam isi *Covid 19 Asian Hate Crime Act* sudah jelas bahwasanya dimana hibah yang diberikan oleh Jaksa Agung untuk negara bagian dan unit pemerintah daerah agar menerapkan sistem NIBRS (*National Incident Based Reporting System*), kemudian dana tersebut juga untuk melatih pegawai agar dapat mengidentifikasi dan mengklasifikasikan kejahatan rasial.

Dalam proses implementasi kebijakan, sering juga ditemui hambatan-hambatan terhadap implementasi. Pelaksana memerlukan fleksibilitas dan hal tersebut terkadang dapat terhambat oleh instruksi yang terlalu spesifik (Edwards 1980). Dalam melaksanakan implementasi kebijakan tersebut, terdapat beberapa hambatan di awal tahun proses implementasinya, seperti dalam proses mencairkan dana hibah dan mempercepat peninjauan UU pada awal tahun UU disahkan.

Covid 19 Asian Hate Crime Act di tahun pertamanya belum dijalankan secara maksimal, di mana 4 bulan setelah UU disahkan tepatnya pada 20 September 2021 anggota Kongres Grace Meng dan Senator Mazie Hirono

mengirimkan surat kepada Jaksa Agung Merrick Garland, isi dari dokumen tersebut mencakup rincian elemen penting dalam UU yang harus segera ditetapkan, untuk itu Meng dan Hirono meminta percepatan dalam peninjauan UU. Dalam surat tersebut juga mewajibkan DOJ mengeluarkan panduan kepada Lembaga Hukum Penegak Negara Bagian, Pemerintah Lokal, dan Suku. Karena pada pasal 4 (a) (1) memuat panduan mengenai cara membuat laporan online kejahatan rasial maupun insiden (Meng 2021).

Dalam surat tersebut juga meminta perluasan kampanye publik dalam berbagai bahasa yang tujuannya untuk meningkatkan kesadaran mengenai kejahatan rasial, serta mendorong korban untuk berani melaporkan kejahatan. Terakhir Meng dan Hirono meminta agar UU tersebut dapat diterapkan pada kejahatan rasial yang terjadi selama pandemi, karena awal pandemi menjadi penyebab naiknya diskriminasi (Meng 2021).

Pada oktober 2021, Merrick Garland sebagai ketua Jaksa Agung hadir di Komite Kehakiman Senat menyampaikan jika DOJ telah berkomitmen dan prioritas utamanya adalah menanggapi kejahatan rasial dan berupaya untuk menjalankan setiap isi dari *Covid 19 Asian hate Crime Act* (Kaneya 2021). Setelah 7 bulan dari disahkannya *Covid 19 Asian Hate Crime Act*. DOJ belum mengambil tindakan, penundaan tersebut sebagian besar disebabkan oleh keputusan DOJ yang meminta dana ke kongres serta menunggu kongres untuk dapat meminta dana tambahan yang akan digunakan pada 2022. Meskipun sebenarnya terdapat opsi memakai dana diskrisi dari DOJ yang disisihkan setiap tahun untuk program kantor kehakiman (Kaneya 2021).

Hal tersebut dikomentari oleh komunitas AAPI, karena dana hibah tersebut seharusnya dapat segera disalurkan untuk organisasi-organisasi lokal yang tepat, kemudian dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk membantu masyarakat jika terjadi insiden kejahatan dan kebencian, namun komentar tersebut tidak ditanggapi oleh DOJ (Kaneya 2021).

Meskipun di tahun pertama dalam implementasi *Covid 19 Asian Hate crime Act* terdapat beberapa hambatan dalam penerapannya, DOJ berhasil menyelidiki dan menuntut 40 terdakwa, 30 kasus, dan 35 hukuman yang berhasil dilaksanakan yang terbukti melakukan kejahatan rasial yang dilakukannya dari awal tahun 2021 (U.S. Department of Justice 2023).

Pada tahun kedua, tepatnya perayaan 1 tahun telah disahkan *Covid 19 Asian Hate Crime Act* yaitu pada Mei 2022, DOJ bersama dengan HHS memberikan serangkaian tindakan untuk mencegah dan menindak kejahatan rasial. Upaya tersebut meliputi penerbitan panduan baru yang tujuannya meningkatkan kesadaran akan kejahatan rasial. Dimana rangkuman Isi dari panduan tersebut adalah gambaran meningkatnya kejahatan kebencian selama pandemi, lonjakan kebencian terhadap AA dan NHPI, beberapa langkah yang dapat diambil penegak hukum dan pejabat pemerintah dalam meningkatkan kesadaran (U.S. Department of Human Services 2022).

Isi dalam panduan baru terdapat 11 poin yang harus diambil oleh lembaga penegak hukum, pertama memastikan jika para korban dan masyarakat mengetahui jika kejahatan rasial yang dialami atau tanpa disadari adalah stigma kebencian, untuk itu tugasnya adalah membangun kepercayaan dengan masyarakat dan mengadakan pendidikan maupun seminar yang dapat

meningkatkan pemahaman mengenai kejahatan rasial dan insiden rasial. Kedua CRS (*Community Relation Service*) sebagai layanan hubungan masyarakat dapat meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mandiri dalam mencegah dan menangani kejahatan rasial (U.S. Department of Justice 2022).

Ketiga terdapat program pemberian hibah oleh DOJ, seperti melalui BJA (*Bureau of Justice Assistance*) sebuah biro bantuan keadilan dibawah DOJ yang mendanai program pendekatan kolaboratif untuk mencegah dan mengatasi kejahatan kebencian yang meningkat pada 2021. BJA mendorong lembaga penegak hukum bekerjasama dengan organisasi tingkat lokal dan negara bagian. Poin keempat menyediakan layanan kesehatan, meskipun tidak mengalami luka fisik namun jika mengalami kejahatan dalam bentuk diskriminasi dapat menyebabkan depresi (U.S. Department of Justice 2022).

Keempat yaitu kompetensi budaya dan akses bahasa, kelima meningkatkan persatuan dan memahami identitas setiap komunitas dimana berkomunikasi dengan pemimpin komunitas maupun organisasi. Keenam aktif melawan kejahatan serta insiden kebencian, yaitu meyakinkan anggota masyarakat jika penegakan hukum bertujuan untuk melindungi masyarakat agar tidak menjadi sasaran kekerasan (U.S. Department of Justice 2022).

Ketujuh menciptakan kampanye kesadaran masyarakat, mempromosikan serta menyebarluaskan informasi mengenai bahayanya kejahatan rasial. Kedelapan menciptakan aliansi melawan kebencian bersama dengan lembaga penegak hukum federal, pemerintah bagian, lokal, dan suku. Kesembilan mendorong kesadaran masyarakat, kesepuluh mendorong pendidikan dan pelatihan penegak hukum, dan yang terakhir menyediakan sumber daya bagi

individu atau komunitas yang mengalami kejahatan rasial (U.S. Department of Justice 2022).

Dalam penyaluran komunikasi dari pemerintah federal ke beberapa aktor yang terlibat untuk menghalau diskriminasi terhadap keturunan Asia Amerika, langkah awal sebagai bentuk dari menjalankan implementasi kebijakan *Covid 19 Asian Hate Crime Act*, diawali dengan komunikasi dengan perintah yang jelas.

Dalam penjelasan di atas sudah sesuai dengan yang dijelaskan oleh Edwards mengenai variabel komunikasi, memuat syarat awal yang mana aktor aktor terlibat dapat mengetahui apa yang akan dilakukan, untuk itu adanya arahan dalam mengimplementasikan kebijakan *Covid 19 Asian Hate Crime act* oleh pemerintahan Joe Biden, dengan menunjuk DOJ sebagai pemegang wewenang utama. Kemudian adanya penjelasan mengenai panduan dalam mengimplementasikan kebijakan, dan menjelaskan mengenai informasi pada masyarakat bahwasanya terdapat penandatanganan UU dengan melihat respon dari AAPI yang menanggapi disahkannya UU.

Pada variabel komunikasi juga ditemui hambatan dalam proses implementasi, penulis memaparkan mengenai hambatan di tahun awal penandatanganan UU yaitu pada 2021 mengenai permintaan dari Grace Meng dan Mazie K.Hirono selaku penyusun UU kepada DOJ agar dipercepat dalam pemrosesan dan penegakan UU. Terakhir terdapat arahan kinerja lanjutan pada 2022 yang mana DOJ dan HHS membuat buku pedoman yang dapat diterapkan oleh penegak hukum bagian dan aktor aktor yang terlibat. Oleh karena itu dalam variabel komunikasi sudah sesuai dengan arahan yang diberikan oleh Edwards.

2.2. Sumber Daya

Jika dalam komunikasi sudah terdapat perintah yang disampaikan secara jelas, akurat, dan konsisten, hal tersebut masih belum sempurna jika dalam menjalankan kebijakan masih kekurangan sumber daya. Karena kemungkinan besarnya adalah implementasi kebijakan tersebut kurang efektif (Edwards 1980).

Sumber daya juga bisa dalam bentuk fasilitas, di mana seorang staf yang cukup memahami dan mempunyai wewenang mengenai apa yang harus dilakukan, sumber daya fasilitas juga dapat dalam bentuk bangunan, peralatan, perlengkapan, dan area ruang hijau untuk mendukung berjalannya pekerjaan dari aktor (Edwards 1980). Sumber daya informasi diperlukan untuk menjalankan suatu kebijakan, para pelaksana perlu mengetahui apa yang harus dilakukan serta data kepatuhan pada peraturan dan regulasi pemerintah (Edward, 1980).

Pertama adalah staf, untuk itu ditunjuknya staf yang bertanggung jawab dalam berjalannya upaya implementasi kebijakan adalah salah satu prosedur menjalankan kebijakan tersebut. Dalam implementasi kebijakan *Covid 19 Asian Hate Crime Act*, tentunya banyak aktor pemerintah maupun non pemerintah yang terlibat, tetapi beberapa departemen yang dijelaskan di sini oleh penulis adalah sebagai contoh dimana upaya pemerintah federal sebagai aktor awal yang menyusun dan mengesahkan UU memberikan wewenang pada sumber daya terpercaya untuk bersama melawan kejahatan rasial dan mengimplementasikan kebijakan yang terdapat dalam UU.

Pemerintah AS menunjuk DOJ sebagai penanggung jawab *Covid 19 Asian Hate Crime Act*. Sumber daya yang ditugaskan untuk merespons tindakan dari peningkatan kejahatan rasial yaitu dengan menunjuk wakil Jaksa Agung sebagai

koordinator Sumber Daya Anti Kejahatan Kebencian yang pertama di DOJ yaitu Saeed Mody, kemudian Kepala Bagian Kriminal Divisi Hak Sipil berperan memfasilitasi percepatan peninjauan kasus kejahatan dan kebencian, selanjutnya menunjuk minimal satu asisten Jaksa AS yang ditugaskan sebagai koordinator Hak Sipil di setiap kantor Kejaksaan AS. Kemudian terdapat penerjemah bahasa atau yang dikenal sebagai koordinator akses bahasa yaitu Ana Paula Noguez Mercado (U.S. Department of Justice 2023).

Pada September 2023, DOJ menyelenggarakan program Bersatu Melawan Kebencian di 94 Kantor Kejaksaan AS. Tujuannya untuk memperkuat kepercayaan antara penegak hukum dan masyarakat, isi dari program tersebut adalah mengajarkan masyarakat agar dapat mengidentifikasi dan melaporkan jika terdapat insiden kejahatan kebencian. DOJ telah menyelenggarakan lebih dari 200 acara secara nasional dan telah memberikan dana hibah \$32 juta kepada penegak hukum, organisasi berbasis masyarakat, kelompok hak-hak sipil, dan mendukung penelitian. (The White House 2023).

CRS (*Community Relations Service*) bagian dari DOJ, menempatkan direktur baru Paul Monteiro, tugasnya adalah memfasilitasi dialog, mediasi, dan pelatihan serta konsultasi kepada komunitas maupun individu yang mendapatkan imbas dari kejahatan rasial. CRS akan berbagi sumber daya dan informasi terhadap masyarakat yang terkena dampak kemudian bekerjasama dengan Pemerintah, pemimpin agama, kelompok masyarakat, universitas, dan sekolah yang mana tujuannya untuk mengatasi dan mencegah kejahatan rasial (Community Relations Service 2023)

Selanjutnya HHS (*Department of Health and Human Services*) yang telah bekerjasama dengan DOJ dalam merilis panduan bersama setelah peringatan satu tahun *Covid 19 Asian Hate Crime Act* ditandatangani untuk membantu dalam mengenal dan mencegah bersama kejahatan rasial. Sekretaris HHS Andrea Palm menyampaikan jika HHS berkomitmen dalam melindungi kesehatan dan kesejahteraan semua komunitas dari kebencian bias (U.S. Department of Health and Human Services 2022).

HHS juga memperoleh informasi mengenai perawatan kesehatan yang sesuai dengan budaya agar dapat dipahami oleh komunitas AA dan NHPI. dimana HHS merilis buku "*Medicare and You*" sebagai pegangan dengan berbagai bahasa seperti bahasa Mandarin, Korea, dan Vietnam. HHS juga meluncurkan pusat bantuan teknis ekuitas, memberikan pelatihan, alat, dan teknik ekuitas bagi karyawan HHS dan memastikan strategi untuk mengurangi kesenjangan akses, penggunaan hibah, untuk itu upaya HHS adalah meningkatkan kompetensi budaya, akses bahasa (The White House 2023).

Di sini pemerintah memberi dana hibah pelatihan senilai \$225 juta untuk rencana penyelamatan, kemudian dengan \$1,1 Miliar yang digunakan untuk tenaga kesehatan "*American Rescue Plan*" yang tujuannya untuk melatih 13.000 komunitas tenaga medis. Terdapat penyebaran 14.00 tenaga medis melalui 150 organisasi nasional dan lokal guna menjangkau dan meningkatkan kepercayaan masyarakat atas vaksinasi, lalu komunitas tenaga medis juga merekrut dan melatih 250 pekerja yang dapat menggunakan 36 bahasa Asia, bahasa asli Hawaii, dan bahasa Kepulauan Pasifik yang telah ditugaskan ke 12 negara bagian serta Hawaii

HHS memberikan pelatihan bantuan teknis bagi para profesional kesehatan dan pelayanan kemanusiaan (The White House 2023).

Lalu peran penting dalam menghalau diskriminasi di lembaga pendidikan yaitu ED (*Educational Department*), di mana mempunyai andil dalam upayanya mengurangi kejahatan rasial. Pada 26 Mei 2021 ED mengeluarkan surat kepada tenaga pendidik mengenai peningkatan kekerasan dan pelecehan yang dialami oleh AA dan NHPI dan mengingatkan sekolah atas perannya dalam mencegah kebencian dan kejahatan (The White House 2022).

Selanjutnya terdapat peran dari pemerintah negara bagian yaitu gubernur dan komunitas lokal yang mempunyai andil untuk mengurangi angka diskriminasi terhadap keturunan Asia Amerika dengan menerapkan pedoman yang telah disusun oleh DOJ dan HHS agar dapat mengimplementasikan kebijakan yang dimuat oleh *Covid 19 Asian Hate Crime Act*. Karena DOJ telah mengembangkan sumber daya baru yaitu memberdayakan pejabat lokal, tokoh masyarakat dan penduduk agar bersama-sama mengatasi insiden kebencian dengan melepaskan dana hibah sebesar \$ 21 juta (U.S. Department of Justice 2021).

Sumber daya dalam bentuk fasilitas contohnya memfasilitasi konferensi regional yang diselenggarakan FBI (*Federal Bureau of Investigation*) di seluruh negara bagian dan lokal untuk mendorong pelaporan, memperkuat hubungan antar penegak hukum, dan organisasi hak-hak sipil setempat. Meluncurkan kampanye nasional Anti-Kejahatan Kebencian yang dipimpin FBI dengan melibatkan 56 kantor yang mencakup iklan ruang, papan reklame, dan terdapat radio streaming (U.S. Department of Justice 2023).

Kemudian dalam sumber daya dalam pencairan dana hibah sebesar \$5 juta oleh DOJ sesuai dengan isi dan program *Jabara Hayer No Hate Act*, yang mana isinya menjadi bagian dari *Covid 19 Asian Hate Crime Act*. OJP (*Office of Justice Programs*) menyediakan dana hibah \$5 juta kepada Biro Statistik Kehakiman yang digunakan untuk mendukung transisi Penegak Hukum bagian dan lokal menggunakan NIBRS atau pelaporan berbasis insiden nasional. Lalu BJA mengeluarkan dan \$5 juta digunakan untuk program pendekatan terhadap komunitas maupun organisasi berbasis komunitas guna meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat ketahanan masyarakat, dan meningkatkan respon atas kejahatan rasial (HHS 2022).

Program Kejahatan Kebencian *Matthew Shepard dan James Byrd, Jr.* dana hibah lebih dari \$17 juta untuk mendukung negara bagian dan lokal, suku, serta mitra untuk menjangkau lebih luas, mendidik para praktisi, lalu menyelidiki dan mengadili kejahatan dan kebencian. BJA mendukung Jaksa dan Penegak Hukum dalam mengadili para pelanggar hak-hak sipil. Pada 2023 hibah yang dikeluarkan BJA sebesar \$1,5 juta, kemudian BJA mendapat \$8 juta dalam bentuk hibah untuk pendekatan berbasis komunitas mengatasi kejahatan dan kebencian. BJS (*Bureau of Justice Statistics*) sebagai Departemen Statistik utama mendapatkan dana \$9 juta agar upaya dalam peningkatan pelaporan kejahatan rasial yang akan membantu Lembaga Penegak Hukum di seluruh Amerika Serikat (*Office of Justice Programs 2023*).

Dalam sumber daya informasi, pemerintah AS melalui DOJ dan HHS telah membuat panduan baru untuk upaya melaksanakan kebijakan yang ditujukan pada penegak hukum negara bagian. Lalu terdapat sistem pelaporan yang telah

dikembangkan melalui BJS (*Bureau of Justice Statistic*) dibawah DOJ yang memberikan informasi mengenai kejahatan rasial dan dapat diakses melalui 3 program yaitu Survei Korban Kejahatan Nasional, Program Statistik Keadilan Federal, dan Program Statistik Kejahatan Kebencian FBI . Tetapi mulai 1 januari 2021, pelaporan yang dilakukan harus menggunakan NIBRS (*National Incident-Based Reporting System*) sebagai standar nasional yang digunakan oleh para Lembaga Penegak Hukum untuk mengirimkan data ke FBI (Bureau of Justice Statistics, n.d.).

Pada sistem pelaporan website, terdapat terjemahan hingga 24 bahasa yang mana 8 bahasa sering dituturkan oleh AAPI meliputi bahasa Arab, Tiongkok (sederhana dan tradisional), Farsi, Hindi, Korea, Urdu, Tagalog, dan Vietnam. Tidak hanya itu masyarakat luas, peneliti, pemerintah, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dapat mengakses kabar terbaru di website DOJ untuk tahu lebih lanjut sudah sejauh mana tindakan yang dilakukan untuk menangani diskriminasi (Community Relations Service 2023).

Penjelasan di atas sudah sesuai dengan yang dijelaskan oleh Edwards mengenai variabel sumber daya, terdapat staf sebagai pendukung dan pelaksana suatu kebijakan, kemudian terdapat pelatihan sebagai penunjang pembekalan pencegahan diskriminasi, lalu dalam variabel sumber daya dijelaskan aktor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan.

Terdapat tambahan sumber daya informasi sebagai langkah awal panduan menjalankan kebijakan tersebut, lalu informasi yang bersifat digital digunakan untuk memberikan informasi dan sarana edukasi masyarakat serta dijelaskan juga cara melaporkan insiden kejahatan kebencian secara online. Dan terakhir contoh

fasilitas yang dapat ditemukan oleh penulis seperti disediakannya ruang untuk konferensi regional yang diselenggarakan oleh FBI untuk mendorong pelaporan negara bagian dan lokal serta memperkuat hubungan antar penegak hukum, dan menyediakan tempat melaksanakan kampanye yaitu menyediakan fasilitas seperti melibatkan 56 kantor yang mencakup iklan ruang, papan reklame, dan tersedia radio untuk melakukan siaran.

Pada bab dua telah menjawab implementasi kebijakan dari UU Covid 19 Asian Hate Crime Act. melalui variabel komunikasi dan sumber daya, penjelasan di atas sudah sesuai dengan yang dijelaskan oleh Edwards. Di mana sudah dijelaskan mengenai alur komunikasi sebagai awal dijalankannya kebijakan, yang mana pelaksana mengetahui tindakan yang harus dilakukan. Karena kejelasan komunikasi dan arahan adalah salah satu penentu pencapaian implementasi, sesuai dengan yang dikemukakan oleh Edwards. Penulis juga menjelaskan mengenai panduan yang terdapat pada isi UU Covid 19 Asian Hate Crime Act, lalu alur komunikasi Presiden Joe Biden dalam memberikan inisiatif tanggung jawab pada DOJ untuk memberikan panduan lebih lanjut terkait penerapan kebijakan dan bekerjasama dengan HHS. Dalam variabel komunikasi penulis juga menjelaskan hambatan pada awal menjalankan implementasi dari UU tersebut.

Kemudian melalui variabel sumber daya, penulis telah menjelaskan mengenai aktor staf yang terlibat dalam pelaksanaan implementasi kebijakan *Covid 19 Asian Hate Crime Act* seperti DOJ yang ditunjuk selaku penanggung jawab implementasi, lalu CRS yang masih menjadi bagian dari DOJ menyediakan fasilitas bagi masyarakat yang mendapatkan kejahatan rasial, kemudian terdapat HHS, ED, dan peran dari gubernur negara bagian.

Sumber daya juga bisa dalam bentuk fasilitas seperti saat konferensi yang diselenggarakan oleh FBI di seluruh negara bagian melibatkan 56 kantor untuk menyuarakan pelaporan diskriminasi keturunan Asia Amerika dengan meluncurkan kampanye nasional anti kejahatan kebencian yang dipimpin oleh FBI. Hal tersebut mencakup ruang iklan, papan reklame, siaran radio dalam bentuk informasi. Kemudian dalam sistem informasi, terdapat sistem yang dikembangkan oleh BJS (*Bureau of Justice Statistic*) dibawah DOJ yang mengembangkan informasi yang dapat diakses untuk mengetahui jumlah data korban secara akurat melalui NIBRS.

Dapat diketahui aktor-aktor yang terlibat dalam upaya mengimplementasikan UU tersebut yang sejalan dengan yang disampaikan oleh Edwards 1980, yang mana sumber daya dapat berupa staf, area ruang hijau sebagai fasilitas para aktor, dan sumber informasi agar para pelaksana kebijakan mengetahui data informasi dan aturan.

BAB 3

DISPOSISI, BIROKRASI, DAN IMPLEMENTASI *COVID 19 ASIAN HATE CRIME ACT*

Setelah menjelaskan mengenai alur komunikasi dan sumber daya sebagai variabel yang menentukan implementasi kebijakan, pada bab tiga terdapat variabel disposisi dan birokrasi yang membantu menjelaskan mengenai implementasi *Covid 19 Asian Hate Crime Act* dari sudut sikap para aktor dan birokrasi. Menurut Edwards variabel disposisi yaitu para pelaksana mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan, pada umumnya mempunyai keleluasaan tentu menjadi penentu bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan (Edwards 1980).

Edwards mengatakan bahwasanya pelaksana kebijakan mungkin tahu apa yang harus dilakukan, memiliki keinginan untuk melaksanakan, dan mempunyai sumber daya yang cukup, tetapi dengan rutinitas yang dijalankan aktor mungkin akan terjadi suatu hambatan. Untuk itu pada variabel terakhir yaitu birokrasi akan menjelaskan mengenai SOP dan fragmentasi. Kemudian akhir dari variabel tersebut dapat diketahui hubungan antara empat variabel dalam poin implementasi.

3.1. Disposisi

Disposisi atau sikap dari para pelaksana memiliki konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan. Karena para pelaksana mempunyai keleluasaan

sikap dalam penerapan, di mana hal tersebut juga dapat menjadi hambatan bagi implementasi kebijakan yang efektif (George C. Edwards, 1980).

Pada zona disposisi juga terdapat efek ketidakpedulian, karena para pelaksananya tidak mempunyai perasaan kuat terhadap kebijakan tersebut. Pada kasus seperti itu para pelaksana membuat implementasi kebijakannya yang secara tidak langsung menghambat proses berjalannya (Edwards 1980).

Penulis akan membahas mengenai sikap negara bagian dalam komitmennya melawan kejahatan rasial dengan upayanya dalam mengurangi angka kejahatan diskriminasi pada keturunan Asia Amerika. Aktor di setiap negara bagian mempunyai cara masing-masing dalam segi mengadopsi kebijakan yang akan diterapkan, untuk itu penulis melihat beberapa negara bagian Amerika Serikat dengan penduduk keturunan Asia tertinggi, dengan melihat komitmennya dalam mematuhi aturan yang telah dibuat berdasarkan *Covid 19 Asian Hate Crime Act*. Menurut data dari *Pew Research Center* negara bagian yang pertama adalah California, terdapat 6,7 juta penduduk Asia Amerika, New York 1,9 juta, Texas 1,6 juta, New Jersey 958.000 dan Washington 852.000 penduduk (Budiman and Ruitz 2021).

Jika melihat data dengan kasus diskriminasi tertinggi yang dilansir melalui data dari *Stop AAPI Hate National Report* pada 2021 kasus tertinggi diskriminasi di Amerika Serikat terletak di negara bagian California yaitu 38.1%, New York 15.7% Washington 4.8%, Texas 3.9%, dan Illinois 3.3%. Yang mana tiga dari lima negara bagian yang mempunyai penduduk keturunan Asia Amerika juga mempunyai tingkat kasus diskriminasi yang tinggi, yaitu California, New York, dan Texas. Lalu New Jersey dan Washington yang masuk sebagai negara bagian

dengan penduduk keturunan Asia Amerika tertinggi tidak termasuk dalam kasus diskriminasi tertinggi di negara bagiannya.

Seharusnya setiap negara bagian dapat memakai pedoman yang telah dirancang oleh DOJ dan HHS, namun ditemukan jika pedoman tersebut akan dilaksanakan pada September 2023, untuk itu penulis memaparkan sikap dari upaya dan proses setiap negara bagian dalam menghalau diskriminasi dalam bidang akses informasi dan pelaporan, pendidikan, dana hibah, dan pelatihan maupun kerjasama dengan komunitas masyarakat yang tujuannya untuk pencegahan dan penanganan diskriminasi.

Gubernur California Gavin Newsom memberikan dana sebesar \$14 juta ke 80 organisasi melalui CDSS (*California Department of Social Services*) untuk periode pertama dari tanggal 15 Mei 2022 hingga tanggal 30 Juni 2024. Tujuannya untuk melawan insiden kebencian dengan konsultasi bersama CAPIAA (*Commision on Asian and Pacific Islander American Affairs*). Dana tambahan sebesar \$80 juta untuk dua tahun kedepan, dan perpustakaan California turut serta dalam memberikan dana hibah sebesar \$10 juta untuk mendukung media etnis (Office Of Governor 2022).

CDSS (*California Department of Social Services*) memberikan dana hibah \$91.147.239 untuk 173 organisasi pada periode hibah tanggal 07 Januari 2023 hingga 30 September 2026. 12 organisasi yang menunjukkan kemajuan dalam layanan intervensi penyintas kejahatan rasial di beri dana \$30.338.308 untuk periode 8 Januari 2022 hingga 31 Juni 2025 (Department of Social Services, n.d.). Sebagian besar dana tersebut untuk mendukung layanan langsung bagi korban insiden kebencian beserta keluarganya, layanan hukum, layanan kesehatan

mental, pencegahan pengembangan pemuda, seni budaya, program keselamatan, pelatihan perencanaan keselamatan, intervensi, dan koordinasi dengan pemerintah daerah serta mitra kelembagaan.(Office Of Governor 2022).

Website resmi California “*Californiavshate*” menyediakan 15 bahasa untuk pelaporan online dan koordinator bahasa yang terlatih dengan 200 bahasa dan kompeten secara budaya. Pemerintah bekerjasama dengan seluruh komunitas yang ada di negara bagian untuk meningkatkan upaya pencegahan, kecepatan pelaporan, dan respon terhadap kejahatan rasial di sekitar (The Arc California, n.d.).

Kantor Kejaksaan Agung sudah mengembangkan protokol untuk merespon secara cepat. Di mana menyediakan agen khusus yang bergerak dengan terampil, pengacara yang ahli dalam menangani hak-hak sipil, profesional dalam bidang pelayanan korban, serta para staf yang cekatan dalam merespon tindak kejahatan rasial (State of California Department of Justice Office of The Attorney General, n.d.). Kemudian dalam segi pendidikan, anggota parlemen California telah mengeluarkan UU yang isinya mewajibkan untuk melakukan studi etnis kelompok Asia Amerika dan kelompok ras lainnya di sekolah menengah. Karena terdapat peningkatan rasisme membuat para ahli fokus pada siswa usia sekolah yang membutuhkan wawasan sejak dini mengenai Asia Amerika dan tindakan buruk dari diskriminasi (Bellamy 2022).

Selanjutnya New York mengalami kenaikan dalam pelecehan dan kekerasan pada komunitas Asia, untuk itu New York membuat kampanye yang tujuannya untuk menyadarkan publik contoh kalimatnya adalah “Saya Masih Percaya Dengan Kota Kita” yang ditulis dalam bahasa Inggris. Di mana

kampanye tersebut mendapat dukungan dari Departemen Kebudayaan New York dan bermitra dengan Departemen Transportasi New York. Untuk akses pelaporan pada diskriminasi dapat melalui NYPD (*New York Department Police*), lalu terdapat akses informasi serta pelaporan dapat menghubungi Komisi Hak Asasi Manusia dengan mengisi formulir yang tersedia atau menghubungi nomor yang tertera dengan dukungan penerjemah (NYC Human Rights, n.d.).

Terdapat pelatihan intervensi pengamat yang dilakukan guna membekali warga New York dengan alat maupun strategi agar sigap dalam merespon ketika terjadi kejahatan rasial. Kemudian sumber daya pendidikan kota New York dan OPHC (*The Office For The Prevention of Hate Crimes*) mengembangkan materi pencegahan diskriminasi yang berkaitan dengan Covid 19 lalu dimasukkan dalam rencana pembelajaran oleh para tenaga pendidik di Kota New York (NYC Human Rights, n.d.).

Beberapa organisasi mendapatkan dana \$1 juta, lalu \$70.000 diberikan kepada CPC (*Chinese-American Planning Council*) yang berkontribusi membantu kesejahteraan penduduk Asia Amerika dalam akses sumber daya, membantu layanan tenaga kerja (Albany 2022). Dan kantor layanan korban di New York mendanai lebih dari 200 program untuk mendukung korban (Albany 2023).

\$20 juta untuk mendukung program pengurangan kekerasan berbasis bukti, dimana 14 komunitas dan 16 organisasi komunitas, Rumah Sakit, petugas penjangkauan pekerja sosial mendapat penghargaan. Program tersebut menggunakan pendekatan kesehatan masyarakat dalam mengatasi diskriminasi dan kekerasan (Albany 2023). Terakhir Departemen Kesehatan New York berupaya menerapkan beberapa inisiatif guna mengurangi diskriminasi terhadap

penduduk Asia Amerika. Tetapi dalam pelayanan kesehatan masih menjadi tantangan, karena dengan adanya masyarakat Asia Amerika yang mempunyai kemampuan bahasa Inggris terbatas membutuhkan akses bahasa yang memadai (NYC Health 2021).

Selanjutnya Texas, gubernur Texas Greg Abbott, menyampaikan pidatonya mengenai diskriminasi saat menghadiri rapat umum Sugar Land, menegaskan jika tidak menoleransi kebencian dan kekerasan terhadap komunitas Asia maupun komunitas lain yang ada di Texas (Bludau 2021).

Tetapi hal tersebut dapat dikatakan berbeda dari tindakan yang dilakukan, RUU yang didukung oleh Gubernur Abbott mengenai pembatasan kepemilikan atau menjual tanah kepada pemerintah entitas Tiongkok, Iran, Korea Utara, dan Rusia. RUU tersebut dikecam oleh penduduk Asia Amerika, karena membuat banyak imigran, pengusaha, pemegang kartu hijau tidak dapat membeli rumah maupun properti. Meskipun RUU tersebut diganti dengan RUU pengganti yang menjelaskan larangan tersebut tidak berlaku pada warga negara Amerika Serikat yang sah maupun warga Amerika Serikat yang mempunyai warga negara ganda, tetapi tetap mendapatkan kritik yang keras (Downen 2023).

Karena meskipun telah gagal disahkan penduduk Asia Amerika kecewa pada gubernur Abbott yang mendukung RUU tersebut. Kelompok aktivis AALC (*Asian American Leadership Council*) dan Komunitas keturunan Asia Amerika yang di Texas melakukan demonstrasi. Di mana langkah dalam mendukung RUU yang melarang kepemilikan properti tersebut menjadi salah satu alasan krisisnyanya kepercayaan masyarakat (Venkatraman 2023)

Kota yang dapat dikatakan kompak di wilayah Texas dalam menghalau diskriminasi adalah kota Austin, para pemimpin kota Austin meluncurkan program pendidikan dan penjangkauan dalam melawan kebencian, dimana tujuannya adalah memberdayakan masyarakat agar lingkungan kota menjadi tempat yang aman dan ramah terhadap akses pelaporan insiden kejahatan dan kebencian. Situs website "*AustinTexasgov/againsthate*" digunakan sebagai pusat informasi dan kampanye. Pemerintah kota bekerjasama dengan masyarakat lokal untuk mengidentifikasi dan menerapkan perbaikan dalam sistem respon jika terdapat tindakan bias kejahatan (AustinTexas.gov 2023).

Selanjutnya negara bagian New Jersey, pada Juli 2021 Kantor Kejaksaan Agung New Jersey mengarahkan lembaga, divisi, dan kantor departemen untuk mengidentifikasi proyek khusus yaitu kejahatan rasial. Rancangan tersebut diinisiasi untuk memajukan keadilan dan kesetaraan ras bagi komunitas yang terdampak diskriminasi. Inisiatif yang diambil seperti memerangi bias, diskriminasi, memastikan perlakuan yang lebih adil kepada individu yang menjadi korban, mempromosikan kesetaraan, dan memperkuat hubungan dengan masyarakat (Office of The Attorney General 2023).

Pada 2021 terdapat hibah \$1 juta untuk memerangi kejahatan kebencian rasial, rinciannya \$750.000 untuk kampanye kesadaran masyarakat dan \$300.000 untuk meningkatkan pelaporan insiden bias dengan mendanai sistem manajemen pencatatan. Agar Lembaga Penegak Hukum berpartisipasi dalam NIBRS (Department of Law and Public Safety 2022). Tahun 2023, DCR (*Division on Civil Rights*) telah menawarkan 262 pelatihan, serta telah

mengadakan lebih dari 25.000 acara dengan topik keadilan rasial (Office of The Attorney General 2023).

Lembaga Advokasi Kejaksaan Agung mengembangkan 2 program untuk menangani kejahatan rasial, pertama pengenalan masalah keadilan rasial dan kedua program yang dirancang untuk para manajer mengatasi perbedaan yang terdapat di lingkungan kerja. September 2022 Divisi Intervensi Kekerasan dan Bantuan Korban dibentuk yang tujuannya untuk pendekatan kesehatan masyarakat, mengurangi dan merespon kekerasan berbasis komunitas maupun pribadi (Office of The Attorney General 2023).

Pada 2022 gubernur Phil Murphy menandatangani UU (S4021/A6100 dan (S3764/A3369) yang mana isinya adalah memasukan kontribusi, sejarah, dan warisan penduduk Asia Amerika dan Kepulauan Pasifik dalam standar pembelajaran materi ilmu sosial pada siswa dari Taman Kanak-kanak hingga kelas 12 (State of New Jersey 2022).

Terakhir Washington, sebelum *Covid 19 Asian Hate Crime Act* disahkan, gubernur Jay Inslee menanggapi diskriminasi yang diperoleh penduduk Asia Amerika. Beliau mengatakan berdiri bersama pihak-pihak yang terkena dampaknya dan mengutuk tindakan diskriminasi serta berkomitmen melakukan dialog agar dapat berbuat lebih baik untuk komunitas Asia Amerika (Washington State Department of Commerce 2021).

Tetapi tindakan signifikan kota negara bagian Washington justru terlihat di King County, hibah \$5 Juta digunakan untuk organisasi masyarakat (Leshikar 2021). Kemudian pelaporan *Hotline* selangkah lebih maju dan dapat tersambung dengan layanan berbasis komunitas. Pejabat King County dan komunitas berharap

meningkatkan pengumpulan data di wilayah tersebut serta meningkatkan kesadaran akan tindak jahat diskriminasi (Yoon 2023).

Pada 2021 terdapat pergantian sistem ke NIBRS dari UCR (*Uniform Crime Reporting*) karena lebih akurat dalam mengidentifikasi kejahatan. Tetapi pada 2021, terdapat kegagalan dalam memasukan data dari 18.000 Penegak Hukum yang terdapat di Amerika Serikat, terdapat 7.000 yang gagal dalam memasukan data ke NIBRS.

Hubungannya dengan negara bagian dalam implementasi kebijakan adalah hambatan dari sebagian negara bagian yaitu pada laporan tahunan, Departemen Kepolisian New York gagal memasukan data ke laporan federal mengakibatkan terhambatnya menggunakan NIBRS. Faktanya FBI telah memberikan dana hibah hampir \$24 juta sejak tahun 2017 ke New York, tetapi NYPD (*New York Police Department*) belum beralih ke sistem baru dan telah diperingati untuk segera beralih hingga bulan Juni 2022. California yang mempunyai 740 lembaga Penegak Hukum, hanya 15 lembaga yang aktif dalam berpartisipasi melaporkan, ditemukan fakta jika California belum mendapat sertifikasi untuk mengirim ke FBI. Setelah mengirim data laporan susulan, pada 2022 terdapat 400 lembaga kepolisian California mengumpulkan data, hal tersebut lebih baik dari pada tahun sebelumnya (Rosenfeld et al. 2022).

Kemudian terdapat New Jersey, dimana persentase pelaporannya naik 2% dari tahun 2021, disusul dengan negara bagian lainnya yang rata-rata laporannya meningkat 15% atau lebih. Meskipun terdapat peningkatan pada pelaporan, tetapi masih jauh melihat status pelaporan stabil, di mana lembaga kepolisian yang terdapat di Texas melaporkan data ke NIBRS, begitu juga dengan New Jersey,

tetapi tidak ditemukan penjelasan terkait yang dapat menjelaskan secara lengkap (Li et al. 2022).

Selanjutnya terdapat Washington, terdapat kenaikan kejahatan tetapi petugas penegak hukum berkurang pada 2022, terdapat 394 pembunuhan meningkat 16,6% dari tahun lalu, dengan penurunan staf di seluruh negara bagian, di mana awalnya terdapat 10,736 menjadi 10,666 (Strachan 2023).

Melihat komitmen dan sikap dari para aktor dalam upayanya untuk mengimplementasikan *Covid 19 Asian Hate Crime Act* negara bagian seperti California, New Jersey, dan New York, dapat dikatakan telah mengambil tindakan dan memenuhi aspek yang telah dicanangkan untuk mengentaskan diskriminasi. Contohnya seperti New Jersey mengadakan kampanye kesadaran masyarakat menggunakan dana \$570.000 dan \$300.000 untuk meningkatkan pelaporan dengan mendanai sistem manajemen pencatatan pelatihan pelaporan. Lalu pada 2023 DCR (*Division on Civil Rights*) mengadakan 262 pelatihan menunjang penegak hukum setempat beralih ke sistem NIBRS. Hal tersebut sebagai salah satu contoh telah memenuhi implementasi kebijakan.

Untuk negara bagian Texas, dengan adanya Rancangan Undang-undang pembatasan kepemilikan atau menjual tanah kepada warga keturunan dari beberapa negara contohnya terdapat dari China, hal tersebut memicu keresahan komunitas Asia Amerika, meskipun telah di perbaharui di mana jika mempunyai kewarganegaraan Amerika Serikat tidak disertakan. Dan mengakibatkan adanya demo yang dilakukan masyarakat. Dan untuk Washington sendiri meskipun sudah terdapat himbauan dari gubernurnya mengenai kejahatan diskriminasi ras tetapi belum tindakan yang diambil berakibat sebaliknya.

Penjelasan di atas sudah sesuai dengan yang dijelaskan oleh Edwards mengenai variabel disposisi yaitu sikap para aktor dalam implementasi kebijakan menentukan berjalannya implementasi tersebut, karena para aktor mempunyai keleluasaan sikap dalam penerapan kebijakan. melihat sikap dan hambatan pada pelaksanaan implementasi dari beberapa negara bagian yaitu California, New Jersey, dan New York dapat dikatakan menjalankan implementasi UU dalam berbagai aspek seperti dana hibah, kesehatan, sumber daya informasi, pendidikan, dan kesehatan. Lalu Texas dan Washington penulis belum menemukan tindakan signifikan untuk membantu dalam implementasi UU, padahal jika melihat data California, New York dan Washington masuk dalam kategori negara bagian dengan keturunan Asia tertinggi dan kasus diskriminasi tertinggi dengan negara bagian tersebut mempunyai permasalahan hambatan dalam sistem pelaporan. Penjelasan tersebut sudah sesuai dengan Edwards, bahwasanya berjalannya implementasi juga melalui faktor sikap, komitmen, dan perasaan dari aktor pelaksana.

3.2. Birokrasi

Setelah melihat sikap dan upaya dari negara bagian dalam mengatasi diskriminasi, variabel selanjutnya terdapat birokrasi yang mana memuat aspek-aspek birokrasi yaitu pembagian kewenangan dan tanggung jawab serta hubungan antar organisasi maupun aktor yang di dalamnya memuat poin SOP (*Standard Operational Procedure*) dan fragmentasi (Edwards 1980). Pertama terdapat SOP yang digunakan untuk menangani situasi yang terjadi selama implementasi yang dapat memberikan fleksibilitas kepada aktor, karena menghemat waktu dalam

membuat keputusan dengan menggunakan jalan pintas agar suatu kebijakan dapat diimplementasikan (Edwards 1980).

Kedua mengenai Fragmentasi, yaitu penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan pada unit-unit yang diberikan tanggung jawab yang akan dilebur dengan SOP yang dibuat oleh pemerintah dalam menghalau diskriminasi terhadap keturunan Asia Amerika dengan menjelaskan mengenai struktur langkah yang diambil oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan (Edwards 1980).

Dalam implementasi kebijakan UU Covid 19 Asian Hate Crime Act., melihat SOP yang terdapat dalam variabel birokrasi penulis dapat melihat struktur dan langkah yang diambil oleh para aktor terlibat dalam implementasi kebijakan. Oleh karena itu, pada bagian ini akan menjawab dari sebagian besar hal yang sudah tercantumkan dalam UU Covid 19 Asian Hate Crime Act. Dimulai dengan tindakan aktif dari pemerintah Amerika Serikat yang berinisiatif dalam pengesahan RUU Covid 19 Asia Hate Crime Act, kemudian penyerahan tanggung jawab kepada DOJ. Pemerintah Amerika Serikat dari tahun 2021 hingga 2023 masih aktif dalam mengambil kebijakan yang upayanya untuk menanggulangi masalah diskriminasi dan kejahatan rasial penduduk Keturunan Asia Amerika yang melonjak di awal pandemi. Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai aktor utama.

Kemudian menjawab dari isi UU Covid 19 Asian Hate Crime, beberapa langkah kebijakan yang telah diupayakan adalah bagian dari menjalankan kebijakan yang tercantum dalam isi UU. Sebagaimana DOJ mendukung pendekatan berbasis komunitas untuk mencegah dan mengatasi kejahatan rasial.

Untuk itu DOJ mengeluarkan dana Hibah sebesar \$10 juta untuk program yang menciptakan pelaporan yang dikelola oleh negara bagian dan mendukung komunitas terdapat 50 pelaporan dengan menggunakan penuturan bahasa AAPI, kemudian dokumen kejahatan anti AAPI akan diterjemahkan ke 20 bahasa (Sonnenberg 2022).

Pada bulan Oktober, DOJ mengatakan bahwasanya OJP (*Office of Justice Programs*) akan memberikan hibah \$21 Juta kepada mitra negara bagian dan lokal untuk menyelidiki, mengadili, dan membantu korban dari kejahatan rasial, di bulan desember terdapat tambahan dana \$300.000 kepada Lembaga Penegak Hukum negara bagian, lokal, suku, dan komunitas (Office of Public Affairs 2021).

Meskipun terdapat pendanaan yang telah dipaparkan oleh DOJ untuk mendirikan *hotline* pelaporan di setiap negara bagian, tetapi penulis menemukan fakta bahwasanya beberapa negara bagian melakukan pendanaan mandiri dan tidak dibantu oleh dana federal dalam memulai *hotline* pelaporannya di awal munculnya pandemi yang menjadi penyebab kejahatan rasial. Contohnya seperti pemerintah negara bagian Oregon yang sudah mulai membuat laporan *Hotline* dari 2020, selanjutnya terdapat New York yang mana Jaksa Agung New York yaitu Letitia James mengumumkan jika sudah membuat *Hotline* pelaporan insiden kejahatan dari Maret 2020 tambahan dari *Hotline* lokal yang sudah ada yaitu dari Westchester County di negara bagian negara New York. terakhir ada California, di mana gubernurnya memberikan pembuatan *Hotline* pelaporan (Mansfield and Morin 2023).

Seperti yang dijelaskan dalam variabel disposisi, bahwasanya terdapat hambatan dalam masalah pergantian pelaporan menggunakan NIBRS, lalu disini

penulis melihat upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan yang terjadi. Karena pada 2021 banyak Lembaga Penegak Hukum yang terlambat mengirim laporan tahunan bahkan ada yang tidak mengirim sama sekali, solusinya terletak pada penyesuaian data laporan yang diterima FBI pada 2022. Setelah peralihan ke NIBRS sebenarnya SRS sudah tidak digunakan lagi, akan tetapi solusi untuk lembaga yang belum melakukan pelaporan sama sekali maka SRS dapat digunakan untuk memberi tahu FBI gambaran perkiraan kejahatan nasional yang terjadi di negara bagian tersebut (Asher 2023).

Kemudian Departemen Kepolisian besar seperti NYPD (*New York Police Department*) dan LAPD (*Los Angeles Police Department*) harus mematuhi dan menggunakan NIBRS mulai tahun 2024. Solusi tersebut dilakukan untuk mengetahui jumlah kejahatan nasional yang benar-benar terjadi, di mana dengan adanya ke pergantian sistem menggunakan NIBRS membantu untuk melihat kejahatan lebih spesifik dan jangkauannya lebih. Kemudian menggunakan SRS lagi pada 2022 untuk Lembaga Penegak Hukum agar pemerintah federal mengetahui perkiraan kejahatan di negara bagian tersebut (Asher 2023).

Selanjutnya terdapat fragmentasi, yaitu melihat aktor-aktor yang bertanggung jawab pada implementasi dari kebijakan *Covid 19 Asian Hate Crime Act*. Pada tingkat federal tentu yang diberi tanggung jawab adalah DOJ, seperti awal penandatanganan pemerintah Joe Biden setelah penandatanganan langsung memberikan tanggung jawab kepada DOJ dalam mengimplementasikan UU tersebut (The White House 2021). Bisa dilihat saat tahun pertama setelah penandatanganan *Covid 19 Asian Hate Crime Act*, empat bulan setelahnya dan belum terdapat tindakan signifikan dari DOJ, Grace Meng dan Mazie Hirono

selaku penyusun UU memberikan surat desakan kepada DOJ untuk segera meninjau UU dan memperluas kampanye ke masyarakat (Meng 2021).

Untuk membuat laporan mengenai kejahatan rasial di setiap negara bagian menjadi tugas lembaga penegak hukumnya seperti Lembaga Kepolisian Setempat atau ke Kantor Sherif Daerah. Contoh lembaga kepolisian besar seperti NYPD (*New York Police Department*). Jaksa Agung negara bagian yang biasanya merangkap sebagai ketua DOJ negara bagian, karena Jaksa Agung mempunyai staf yang akan membentuk Kantor Kejaksaan Agung Negara Bagian dan salah satu kantornya berupa DOJ negara bagian (Departemen Kehakiman Negara Bagian). Peran jaksa agung juga sebagai pembela dan penegak Undang-undang serta melayani kepentingan publik.

Jika melihat dari variabel disposisi, di setiap negara bagian jaksa agung mempunyai tanggung jawab dalam berjalannya kebijakan dari implementasi *Covid 19 Asian Hate Crime Act*. karena sudah tugasnya untuk melindungi masyarakat (Attorney General Duties, n.d.). Sebagai contohnya jaksa agung negara bagian California saat menghadapi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan segera mengambil tindakan yaitu mendesak para pemimpin yang terdapat di seluruh negara bagian California dan masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya yang telah disediakan oleh Jaksa Agung yaitu mencakup buletin Penegak Hukum yang terdapat rangkuman UU perdata dan pidana, brosur dan lembar fakta yang terdapat dalam 24 bahasa untuk membantu identifikasi dan merespon kejahatan rasial yang telah dilaporkan oleh masyarakat California. Lalu pada 2022 terdapat peningkatan diskriminasi rasial di California sebesar 20,2%. Meskipun tidak termasuk semua kejahatan yang terdapat di seluruh negara bagian, hal

tersebut yang membuat Jaksa Agung California Rob Bonta membuat diskusi kritis yang diadakan untuk pengembangan solusi dengan berbasis komunitas untuk melindungi masyarakat dan komunitas (Attorney General Rob Bonta 2023).

Aktor penting lainnya terdapat gubernur negara bagian selaku aktor yang bertanggung jawab dalam mengarahkan dan terlaksananya implementasi kebijakan tersebut (National Governors Association, n.d.). Contohnya gubernur negara bagian California Gavin Newsom yang mengalokasikan dana ke organisasi yang bertujuan untuk melawan insiden kejahatan, bisa dilihat perbedaannya dengan gubernur Texas Greg Abbott yang mendukung RUU pelarangan properti di mana salah satunya untuk warga China, hal tersebut yang membuat komunitas Asia Amerika di Texas melakukan demonstrasi.

Dapat terlihat jika faktor dari gubernur negara bagian mempunyai dampak dalam tanggung jawab implementasi kebijakan, di mana jika melihat gubernur California Gavin Newsom terlihat mengimplementasikan kebijakan *Covid 19 Asian Hate Crime Act*, dengan tindakan mengalokasikan dana hibah ke beberapa organisasi Asia Amerika, gubernur negara bagian Texas Greg Abbott dengan tindakannya yang mendukung RUU pelarangan properti yang bertolak belakang dengan implementasi kebijakan dalam upaya mengurangi diskriminasi terhadap keturunan Asia Amerika.

Negara bagian juga mempunyai tanggung jawab untuk melaporkan dan mempunyai *Website* maupun *Hotline* agar mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi dan panduan laporan jika terdapat kejahatan rasial di sekitarnya.

Penjelasan di atas sudah sesuai dengan yang dijelaskan oleh Edwards mengenai variabel birokrasi, poin SOP menjelaskan situasi yang terjadi selama implementasi mengenai struktur dan langkah yang diambil oleh para aktor dalam menjalankan implementasi kebijakan. Sesuai yang tercantum pada *Covid 19 Asian Hate Crime Act*, lalu menjelaskan hambatan yang terjadi selama proses implementasi seperti pergantian ke sistem NIBRS. Serta dalam fragmentasi menjawab mengenai aktor yang bertanggung jawab terhadap implementasi kebijakan.

Bagian bab tiga telah menjelaskan variabel disposisi dan birokrasi sesuai dengan yang dijelaskan oleh Edwards mengenai implementasi kebijakan *Covid 19 Asian Hate Crime Act*. Dengan sikap (disposisi) dari para aktor, dapat menentukan arah terlaksananya implementasi kebijakan dalam upaya mengurangi diskriminasi pada keturunan Asia Amerika di negara bagian yang dilakukan oleh beberapa gubernur negara bagian dengan contoh negara bagian seperti California, Washington, Texas, New Jersey, dan New York. Yang mana meskipun New Jersey dan Washington masuk dalam kategori dengan penduduk keturunan Asia tertinggi tetapi dalam jumlah diskriminasinya tidak termasuk menjadi lima negara bagian yang mempunyai kasus diskriminasi tertinggi di Amerika Serikat.

Birokrasi sebagai variabel akhir yang menerangkan mengenai SOP atau disebut sebagai standar operasional dan fragmentasi yaitu melihat aktor yang akan bertanggung jawab dengan implementasi *Covid 19 Asian Hate Crime Act*. Dalam faktor SOP menjelaskan rangkaian kebijakan yang telah dilaksanakan sesuai dengan isi dari *Covid 19 Asian Hate Crime Act* serta menjelaskan langkah

dari aktor yang menjalankan implementasi tersebut saat terjadi hambatan laporan tahunan.

Kemudian pada bagian fragmentasi penulis menjawab aktor yang bertanggung jawab dan mempunyai andil besar dalam implementasi seperti DOJ, gubernur negara bagian, dan jaksa agung atau DOJ negara bagian. Dengan menjabarkan mengenai dua variabel terakhir yaitu disposisi dan birokrasi pada bab tiga ini telah menjawab variabel disposisi dan birokrasi sesuai dengan yang dijelaskan oleh Edwards dalam teorinya.

3.3. Implementasi

Bab terakhir ini dimulai dengan pemeriksaan eksplisit terhadap apa yang tersirat dalam empat bab terakhir yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi mempengaruhi implementasi secara tidak langsung maupun langsung, melalui interaksi satu sama lain (Edwards, 1980).

Di mana pengaruh langsung faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi terhadap implementasi kebijakan. Yang memberi dampak secara langsung maupun tidak langsung pada pelaksanaannya, dengan kata lain komunikasi mempengaruhi sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, yang pada gilirannya mempengaruhi implementasi (Edwards, 1980).

Selanjutnya dalam variabel implementasi terdapat variabel yang harus dijelaskan yaitu Sumber daya yang juga secara tidak langsung mempengaruhi implementasi. Mereka berinteraksi dengan komunikasi dalam beberapa cara, karena Jumlah staf yang tidak mencukupi dapat menghambat penyampaian arahan kebijakan (Edwards, 1980).

Melihat dari empat variabel yang mempengaruhi implementasi melalui interaksi satu sama lain, pertama terdapat faktor komunikasi yang telah dijalankan yaitu panduan yang terdapat dalam UU telah menjelaskan apa yang harus dilaksanakan, terdapat panduan yang disusun oleh DOJ dan HHS sebagai panduan implementasi, dan menjelaskan mengenai hambatan di tahun awal pelaksanaan kebijakan.

Variabel sumber daya dalam mengimplementasikan UU mempengaruhi siapa yang ditunjuk sebagai aktor yang akan menjalankan UU dan membantu mengimplementasikan UU tersebut. Contohnya seperti DOJ, bagian DOJ terdapat CRS, OJP (*Office of Justice Programs*), kemudian departemen lain ada HHS ikut bertanggung jawab dalam pembuatan panduan pedoman yang dibuat bersama DOJ, lalu terdapat ED (*Educational department*) aktor yang bertugas untuk memantau dan mengurangi kejahatan diskriminasi dalam pendidikan. Kemudian terdapat Gubernur dan NGO (*Non Government Organization*) yang ada di negara bagian untuk membantu dalam implementasi UU tersebut. dalam sumber daya yang dapat di akses masyarakat dengan menyediakan informasi terbaru dan panduan pelaporan yang mana menyediakan website dengan akses 24 bahasa (Bureau Of Justice Statistic, n.d.).

Disposisi yaitu sikap dari aktor yang menjalankan implementasi kebijakan yang diadopsi oleh aktor negara bagian sesuai dengan fleksibilitas masing-masing untuk kebijakan yang akan diterapkan. Di mana dalam disposisi penulis menjelaskan mengenai kebijakan yang telah diadopsi oleh aktor yang terdapat di negara bagian yaitu California, New York, New Jersey, Texas, dan

Washington. Lalu menjelaskan hambatan yang dilalui oleh para aktor di negara bagian dengan melihat cara mengatasi setiap hambatan tersebut.

Dalam variabel birokrasi terdapat SOP atau biasa disebut sebagai prosedur operasi standar yang mendukung implementasi maupun menangani situasi yang berkaitan dengan cara implementasi karena memberikan fleksibilitas, di sini penulis menjelaskan mengenai aktor-aktor yang telah mengambil tindakan sesuai dengan isi *Covid 19 Asia Hate Crime Act*. serta beberapa contoh tindakan dari aktor negara bagian yaitu gubernur yang mengambil inisiatif dengan membuat laporan hotline secara mandiri. Serta menjelaskan mengenai cara aktor yang terlibat dalam menyelesaikan hambatan pelaporan saat menjalankan kebijakan.

Pada poin fragmentasi, yaitu penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan pada unit-unit yang telah diberikan tanggung jawab untuk menjalankan sebuah kebijakan. Di mana hubungannya dengan variabel komunikasi yaitu menjelaskan mengenai DOJ yang mempunyai wewenang untuk membuat panduan dan menyebarkan pada pemerintah bagian, lokal, maupun suku untuk dilaksanakan. Hal tersebut berhubungan dengan fragmentasi yang menjelaskan mengenai aktor yang bertanggung jawab pada implementasi dan pelaporan kebijakan di ranah federal maupun negara bagian.

Melalui model diatas dapat terlihat bahwasanya setiap variabel mempunyai keterkaitan satu sama lain. Variabel komunikasi mempengaruhi sumber daya dengan melihat aktor yang terlibat dan fasilitas yang disediakan untuk mendukung, lalu pengaruh dari variabel komunikasi pada disposisi yaitu melihat komunikasi dari para aktor, cara aktor negara bagian mengadopsi

kebijakan tersebut, dan komunikasi saat mencoba mengatasi suatu hambatan selama menjalankan kebijakan tersebut, yang berarti terdapat unsur variabel sumber daya.

Terakhir variabel birokrasi yang mempunyai dua poin penting didalamnya yaitu SOP membahas mengenai kerja dari aktor yang mengimplementasikan isi dari *Covid 19 Asian Hate Crime Act* dan melihat cara pemerintah mengatasi hambatan yang terjadi selama implementasi, hal tersebut berkaitan dengan para aktor yang terlibat untuk menjalankan isi dari *Covid 19 Asian Hate Crime Act*. kerja tersebut menyimpulkan terdapat unsur komunikasi dengan melihat perintah kebijakan yang dijalankan, variabel sumber daya dengan melihat aktor-aktor yang terlibat, dan disposisi dengan menyorot sikap dan cara kerja para aktor implementasi dalam menjalankan kebijakan tersebut dan menyikapi hambatan yang dihadapi.

Implementasi sebagai penutup dan kesimpulan melihat pengaruh dari empat variabel yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan birokrasi. Dimana empat variabel tersebut saling mempengaruhi satu sama lain dalam pelaksanaan implementasi kebijakan. Setelah memaparkan penjelasan diatas penulis telah menjawab empat variabel pada bab dua dan tiga, dan menjelaskan keterkaitan satu sama lain antara variabel pada bagian implementasi, oleh karena itu penulis sudah menjawab sesuai dengan model implementasi kebijakan yang dijelaskan oleh Edwards pada 1980.

BAB 4

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Presiden Joe Biden yang dilantik pada 2021 menjanjikan dalam kepemimpinannya untuk menyetarakan, memajukan, dan memberikan keadilan bagi komunitas seperti AAPI. Salah satu kemajuan dalam hal tersebut disahkannya *Covid 19 Asian Hate Crime Act*. Oleh presiden Joe Biden pada 20 Mei 2021 yang diperkenalkan oleh Grace Meng dan Mazie Hirono. Di mana penulis membuat rumusan masalah bagaimana implementasi dari *Covid 19 Asian Hate Crime Act*. setelah disahkan menggunakan teori dari George Edwards III 1980.

Terdapat empat variabel pertama pada variabel komunikasi menjelaskan aktor yang bertanggung jawab pada *Covid 19 Asian Hate Crime Act* adalah DOJ, kemudian isi yang terdapat pada UU tersebut sudah jelas hal apa yang harus dijalankan. Selanjutnya dijelaskan juga hambatan awal pada proses komunikasi, serta panduan pedoman yang disusun oleh DOJ dan HHS yang akan digunakan oleh pemerintah federal, pemerintah negara bagian, lokal, dan suku.

Pada variabel sumber daya terdapat DOJ serta petugas yang ditunjuk untuk proses yang berkaitan dengan implementasi UU, lalu terdapat aktor-aktor lain yang mempunyai andil dalam menjalankan UU tersebut. Seperti bagian dari DOJ terdapat CRS, lalu aktor lainnya terdapat HHS, ED, dan Gubernur negara bagian. SDM informasi terdapat website yang disediakan oleh DOJ untuk mengetahui informasi dan pelaporan, negara bagian juga menyediakan website

untuk membuat laporan maupun menyediakan informasi mengenai diskriminasi, lalu terdapat sistem NIBRS sistem yang digunakan untuk para negara bagian dapat melapor secara signifikan dimana tujuannya agar mengetahui jumlah dan faktor diskriminasi secara lebih lengkap.

Variabel disposisi menjawab sikap dari aktor dalam mengadopsi kebijakan dan mengimplementasikannya, dengan melihat beberapa negara bagian Amerika Serikat. Di sini penulis menemukan fakta bahwasanya panduan pedoman yang disusun oleh DOJ dan HHS rencananya akan digunakan pada September 2023. Untuk itu penulis menentukan sikap dari aktor yang terdapat di negara bagian menggunakan indikator rangkuman yang terdapat pada panduan pedoman yaitu mengenai dana hibah, kesehatan, pendidikan, pelatihan maupun kerjasama dengan komunitas masyarakat.

Melihat aktor di negara bagian mengimplementasikan kebijakan disini ditemukan negara bagian seperti California, New Jersey, dan New York sebagian besar telah mengambil tindakan seperti aspek yang telah disebutkan. Contohnya negara bagian New York menyelenggarakan pelatihan dan mengembangkan materi pencegahan diskriminasi berkaitan dengan Covid 19 guna masyarakat sigap dalam menghadapi kejahatan diskriminasi di sekitarnya.

Hambatan yang dialami oleh lima negara bagian sebagian besar sama yaitu masalah pelaporan tahunan, dimana California yang sudah menerapkan indikator implementasi untuk mengentaskan kejahatan rasial khususnya pada keturunan Asia Amerika masih terkendala dengan sistem pelaporan tahunan yang menghambat pemerintah federal menganalisis tingkat penurunan atau kenaikan kejahatan diskriminasi secara signifikan. Hal tersebut juga terjadi di New York,

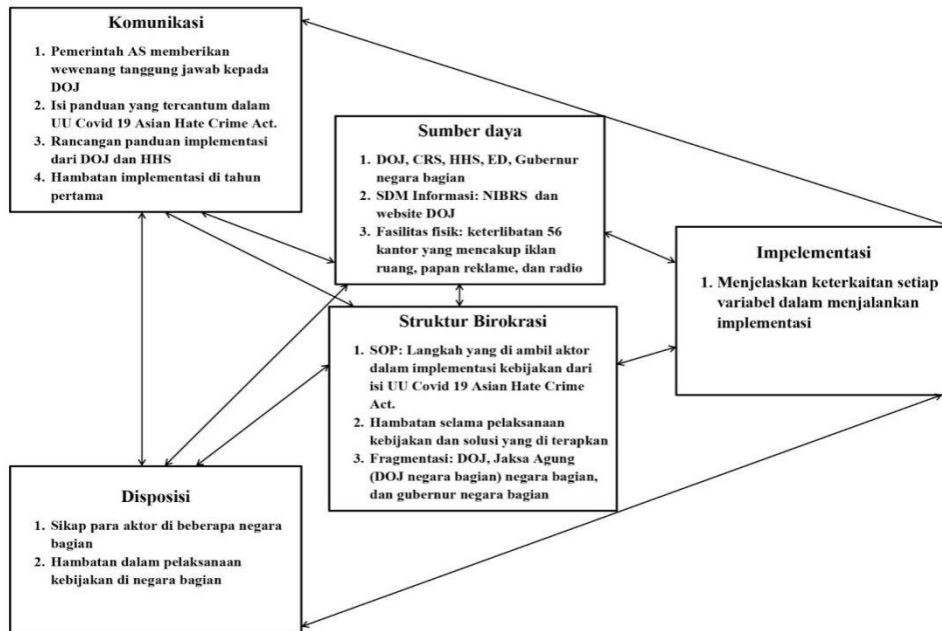
Washington, New Jersey, Texas, yang mempunyai masalah yang sama yaitu hambatan pada laporan tahunan karena pergantian sistem ke NIBRS.

Selanjutnya variabel birokrasi yang mempunyai dua poin yaitu SOP dan .fragmentasi. Pada bagian SOP penulis menjelaskan mengenai cara kerja pemerintah yang telah mengimplementasikan isi dari UU Covid 19 Asian Hate Crime Act. dimana kesimpulannya meskipun implementasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah dan aktor yang terlibat secara konsisten, tentu masih menemui hambatan dalam menjalankan implementasi tersebut salah satunya adalah mengenai laporan tahunan ke NIBRS. Dengan banyaknya Lembaga Penegak Hukum negara bagian yang telat dalam melapor dan ada yang belum melapor sama sekali menjadikan pemerintah sulit mengidentifikasi suatu kejahatan rasial, solusinya disini adalah FBI memberi tenggat waktu pada para Penegak Hukum untuk segera melaporkan hasil dari pelaporan kejahatan rasial. Lalu SRS yaitu sistem lama yang sudah digantikan oleh NIBRS boleh dipakai kembali untuk melihat gambaran kasar dari angka diskriminasi di negara bagian tersebut.

Kedua yaitu fragmentasi, menjelaskan mengenai aktor yang bertanggung jawab dan mempunyai peran besar pada implementasi *Covid 19 Asian Hate Crime Act*. Pada tingkat federal terdapat DOJ, lalu pada tingkat negara bagian terdapat gubernur selaku aktor penting berjalannya setiap program implementasi kebijakan mengentaskan diskriminasi keturunan Asia Amerika di setiap wilayahnya contohnya seperti upaya gubernur negara bagian California yang memberikan dana hibah untuk melawan insiden kebencian melalui CDDS (*California Department of Social Services*). Kemudian terdapat DOJ negara bagian maupun

Lembaga Penegak Hukum seperti NYPD (*New York Police Department*) yang bertanggung jawab pada laporan tahunan kejahatan diskriminasi.

4.1.1 Bagan Implementasi George C. Edwards III 1980



Dalam bagan tersebut telah menjawab mengenai isi dari setiap komponen variabel yang dijelaskan oleh Edwards pada 1980 yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Di mana setiap variabel mempunyai poin yang saling berkaitan dalam upaya implementasi kebijakan *Covid 19 Asian Hate Crime Act*. Akhir pada bagian empat variabel tersebut adalah implementasi yang kesimpulannya menjelaskan keterkaitan antar variabel.

Implementasi dapat disebut sebagai bagian penutup dari empat variabel, menjelaskan mengenai keterkaitan antara setiap variabel untuk saling menopang dalam upaya mengimplementasikan kebijakan. Di mana kesimpulannya adalah

setiap variabel mempunyai keterkaitan satu sama lain untuk saling mendukung dalam upaya implementasi kebijakan, contohnya antara variabel sumber daya dan komunikasi di mana implementasi berjalan karena terdapat sumber daya yang diberi tanggung jawab, lalu keterkaitannya dalam variabel komunikasi adalah setiap sumber daya membutuhkan panduan implementasi kebijakan yang terdapat pada variabel komunikasi agar implementasi tersebut berjalan.

Penulis telah menjawab faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan menggunakan teori dari Edwards. Di mana komunikasi maupun panduan yang telah dibuat masih dapat diubah dalam proses implementasinya, meskipun suatu implementasi berjalan secara baik bukan berarti tidak terdapat hambatan. Dapat dilihat jika *Covid 19 Asian Hate Crime Act* dalam proses implementasinya masih ditemukan hambatan-hambatan yang menghalangi proses implementasi tersebut, seperti masalah peninjauan kejahatan rasial, masalah dana hibah, maupun masalah keterlambatan membuat laporan tahunan.

4.2 Rekomendasi

Penulis menyadari bahwasanya jika penelitian ini belum dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis berharap jika penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber acuan maupun referensi untuk memperluas penelitian pada masa yang akan datang. Terutama mengenai isu hak asasi manusia dan isu diskriminasi pada keturunan Asia Amerika, kemudian penulis berharap bahwasanya peneliti selanjutnya akan memperluas variabel,

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Edwards, George C. *Implementing Public Policy*. Washington, United States, 1980.

Jurnal

- Han, Sungil, Jordan R. Riddel, and Alex R. Piquero. 2023. "Anti Asian American Hate Crimes Spike During the Early Stages of the Covid-19 Pandemic." *Journal of Interpersonal Violence* 38, no. 3-4 (February): 3513-3532.
- He, Xian, and Yu Xie. 2022. "The moral filter of patriotic prejudice: How Americans view Chinese in the Covid 19." *Social Sciences*, 1-6.
- Huang, Justin T, Masha Krupenkin, David Rothschild, and Julia L. Cunningham. 2022. "The cost of anti-Asian racism during the COVID-19 pandemic." *Nature Human Behaviour*, 682-684.
- Lantz, Brendan, and Marin R. Wenger. 2023. "Anti-Asian Xenophobia, Hate Crime, and Fear of Victimization During the COVID-19 Pandemic." *Journal of Interpersonal Violence* 38, no. 1-2 (January): 1088-1116.
- Lee, C. Aujean, and John C. Arroyo. 2022. "A Typology of Local and State Government Responses to Racism: A Case of Anti-Asian Hate in the COVID-19 Pandemic" *Journal of Planning Education and Research*, 2-8.
- Serra, Fernando A., Fellipe S. Martins, and Julio A. da Cunha. 2018. "Secondary Data in Research - Uses and Opportunities." *Revista Ibero Americana de Estrategia* Vol. 17, No. 4:01-04.
- Simeon Man. 2020. "Anti-Asian violence and US imperialism." *Race and Class* 62, no. 2 (October-December): 24-33.
- Tessler, Hannah, Meera Choi, and Grace Kao. 2020. "The Anxiety of Being Asian American: Hate Crimes and Negative Biases During the COVID-19 Pandemic." *American Journal of Criminal Justice*, 638-641.

Website

- Albany. 2022. "Governor Hochul Announces Funding to Assist Asian American Community Organizations Across New York State." Governor Kathy Hochul. <https://www.governor.ny.gov/news/governor-hochul-announces-funding-assist-asian-american-community-organizations-across-new>.
- Albany. 2023. "Governor Hochul Announces More Than \$51 Million to Improve Safety and Security of Organizations at Risk of Hate Crimes, the Most Ever Awarded by the State." Governor Kathy Hochul. <https://www.governor.ny.gov/news/governor-hochul-announces-more-51-million-improve-safety-and-security-organizations-risk-hate>.
- Albany. 2023. "Governor Hochul Announces \$20.3 Million to Support SNUG Street Outreach Programs in 14 Communities Across New York State." Governor Kathy Hochul. <https://www.governor.ny.gov/news/governor-hochul-announces-203-million-support-snug-street-outreach-programs-14-communities>.
- Arroyo, Martin. 2021. ".,." - YouTube. <https://www.themarshallproject.org/2023/07/13/fbi-crime-rates-data-gap-nibr>.

- Asher, Jeff. 2023. "The FBI's National Crime Estimates for 2022 Should Be Much Better." Jeff-alytics. <https://jasher.substack.com/p/the-fbis-national-crime-estimates>.
- Attorney General Duties. n.d. "Attorney General: Attorney General Duties." State of Michigan. Accessed January 30, 2024. <https://www.michigan.gov/ag/attorney-general-duties>.
- AustinTexas.gov. 2023. "City Launches Anti-Hate Education and Outreach Initiative." AustinTexas.gov. <https://www.austintexas.gov/news/city-launches-anti-hate-education-and-outreach-initiative>.
- Bellamy, Tat. 2022. "Schools are starting to mandate Asian American studies. More could follow suit." NBC News. <https://www.nbcnews.com/news/asian-america/schools-are-starting-mandate-asian-american-studies-follow-suit-rcna11118>.
- Bureau Of Justice Assistance. 2023. "Stop Anti-Asian Hate Campaign | Bureau of Justice Assistance." Bureau of Justice Assistance. <https://bja.ojp.gov/funding/awards/15pbja-23-gg-04171-adv>.
- BJA. 2023. "Stop Anti-Asian Hate Campaign | Bureau of Justice Assistance." Bureau of Justice Assistance. <https://bja.ojp.gov/funding/awards/15pbja-23-gg-04171-adv>.
- Bludau, Janelle. 2021. "Gov. Abbott attends Sugar Land rally, denounces hate against Asian-American community." KHOU. <https://www.khou.com/article/news/local/governor-greg-abbott-attends-sugar-land-rally-denounces-hate-against-asian-american-community/285-35a5c993-133a-46f4-b813-7d358caa969e>.
- Briscoe, Scott. 2023. "New FBI Data Shows Large Increase in Hate Crimes." ASIS International. <https://www.asisonline.org/security-management-magazine/latest-news/today-in-security/2023/march/fbi-hate-crimes-data/>.
- Brockell, Gillian. 2021. "The long, ugly history of anti-Asian racism and violence in the U.S." The Washington Post. <https://www.washingtonpost.com/history/2021/03/18/history-anti-asian-violence-racism/>.
- Budiman, Abby, and Neil G. Ruitz. 2021. "Key facts about Asian Americans, a diverse and growing population." Pew Research Center. <https://www.pewresearch.org/short-reads/2021/04/29/key-facts-about-asian-americans/>.
- Budiman, Abby, and Neil G. Ruiz. 2021. "U.S. Asian population grew fastest of any race, ethnicity in 2000-2019." Pew Research Center. <https://www.pewresearch.org/fact-tank/2021/04/09/asian-americans-are-the-fastest-growing-racial-or-ethnic-group-in-the-u-s/>.
- Bureau of Justice Assistance. 2022. "FY 2022 Community-based Approaches to Prevent and Address Hate Crimes | Bureau of Justice Assistance." Bureau of Justice Assistance. <https://bja.ojp.gov/funding/opportunities/o-bja-2022-171345>.
- Bureau of Justice Statistics. n.d. "Bias-Motivated/Hate Crime | Bureau of Justice Statistics." Bureau of Justice Statistics. Accessed November 30, 2023. <https://bjs.ojp.gov/topics/crime/hate-crime>.
- Calif. 2023. "AAPI Data and Momentive Announce Data From Annual Survey." Momentive. <https://www.momentive.ai/en/newsroom/aapi-data-and-momentive-announce-annual-survey/>.

- Chin, Caitlin. 2021. "Why Democrats and Republicans would benefit from hate crime protections for Asian Americans." Brookings. <https://www.brookings.edu/blog/how-we-rise/2021/04/13/why-democrats-and-republicans-would-benefit-from-hate-crime-protections-for-asian-americans/>.
- Community Relations Service. 2023. "CRS Responds to Hate Crimes Against Asian Americans and Pacific Islanders." Department of Justice. <https://www.justice.gov/crs/highlights/AAPI-hate-crimes>.
- Community Relations Services. 2023. "CRS Responds to Hate Crimes Against Asian Americans and Pacific Islanders." Department of Justice. <https://www.justice.gov/crs/highlights/AAPI-hate-crimes>.
- Criminal Justice Research Report. 2022. "Hate Crime in New York State 2021 Annual Report."
- Department of Law and Public Safety. 2022. "2021 Was a Record-High Year for Reported Bias Incidents in New Jersey - New Jersey Office of Attorney General." - New Jersey Office of Attorney General. <https://www.njoag.gov/2021-was-a-record-high-year-for-reported-bias-incidents-in-new-jersey/>.
- Department of Law and Public Safety. 2022. "2021 Was a Record-High Year for Reported Bias Incidents in New Jersey - New Jersey Office of Attorney General." - New Jersey Office of Attorney General. <https://www.njoag.gov/2021-was-a-record-high-year-for-reported-bias-incidents-in-new-jersey/>.
- Department of Law and Public Safety. n.d. "Bias Incident Reports | New Jersey State Police." NJ.gov. Accessed December 20, 2023. <https://www.nj.gov/njsp/ucr/bias-incident-reports.shtml>.
- Department of Social Services. n.d. "Stop the Hate Program Funding." California Department of Social Services. Accessed November 24, 2023. <https://www.cdss.ca.gov/inforesources/cdss-programs/civil-rights/care-funding>.
- Doucleff, Michael. *Newly published evidence points to Wuhan seafood market as pandemic origin point*. 2022. <https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2022/03/03/1083751272/striking-new-evidence-points-to-seafood-market-in-wuhan-as-pandemic-origin-point>.
- Downen, Robert. 2023. "Texas senators, facing criticism, soften proposed ban on Chinese purchases of land." The Texas Tribune. <https://www.texastribune.org/2023/03/02/texas-chinese-land-bill/>.
- Fish, Eric. 2016. "Asian Americans' Expanding Influence in U.S. Politics." Asia Society. <https://asiasociety.org/blog/asia/asian-americans-expanding-influence-us-politics>.
- Governor Kathy Hochul. 2023. "Governor Hochul Announces More Than \$51 Million to Improve Safety and Security of Organizations at Risk of Hate Crimes, the Most Ever Awarded by the State." Governor Kathy Hochul. <https://www.governor.ny.gov/news/governor-hochul-announces-more-51-million-improve-safety-and-security-organizations-risk-hate>.
- HHS. 2022. "DOJ, Joined by HHS, Announce New Initiatives to Address and Prevent Hate Crimes and Hate Incidents." HHS.gov. <https://www.hhs.gov/about/news/2022/05/20/justice-department-announces-new-initiatives-address-prevent-hate-crimes-hate-incidents.html>.
- HHS. 2022. "DOJ, Joined by HHS, Announce New Initiatives to Address and Prevent Hate Crimes and Hate Incidents." HHS.gov.

<https://www.hhs.gov/about/news/2022/05/20/justice-department-announces-new-initiatives-address-prevent-hate-crimes-hate-incidents.html>.

- Hirono, Mazie. 2021. "Hirono and Meng Introduce Bill to Address Surge of Anti-Asian Hate Crimes During Coronavirus Pandemic | Mazie K. Hirono - A Voice for Hawai'i in the U.S. Senate." Senator Mazie Hirono. <https://www.hirono.senate.gov/news/press-releases/hirono-and-meng-introduce-bill-to-address-surge-of-anti-asian-hate-crimes-during-coronavirus-pandemic>.
- Human Rights Watch. 2020. "Covid-19 Fueling Anti-Asian Racism and Xenophobia Worldwide." Human Rights Watch. <https://www.hrw.org/news/2020/05/12/covid-19-fueling-anti-asian-racism-and-xenophobia-worldwide>.
- Jenkins, Philip. 2023. "White supremacy | Definition, History, Examples, & Facts." Encyclopedia Britannica. <https://www.britannica.com/topic/white-supremacy>.
- Josh Gottheimer. 2023. "RELEASE: Gottheimer Joins Roundtable With North Jersey Korean American Community and Business Leaders." Josh Gottheimer. <https://gottheimer.house.gov/posts/release-gottheimer-joins-roundtable-with-north-jersey-korean-american-community-and-business-leaders>.
- Kaneya, Rui. 2021. "After a spike in anti-Asian hate crimes, the government response stalls." Center for Public Integrity. <https://publicintegrity.org/inside-publici/newsletters/watchdog-newsletter/spike-anti-asian-hate-crimes-response-stalls/>.
- Leshikar, Maya. 2021. "King County devotes \$5M of its federal COVID-19 aid to battling anti-Asian hate." The Seattle Times. <https://www.seattletimes.com/seattle-news/politics/inslee-other-public-officials-vow-to-act-against-hate-bias-king-co-devotes-5-million-of-its-federal-covid-19-aid-to-effort/>.
- Li, Weihua, Andrew Rodriguez, David Eads, Anna Flagg, Bo -WonKeum, Jasmyne Ricard, Jamiles Lartey, et al. 2022. "See if Police in Your State Reported Crime Data to the FBI." The Marshall Project. <https://www.themarshallproject.org/2022/08/15/see-if-police-in-your-state-reported-crime-data-to-the-fbi>.
- "Milestones: 1866–1898 - Office of the Historian." n.d. Milestones: 1866–1898 - Office of the Historian. Accessed May 19, 2023. <https://history.state.gov/milestones/1866-1898/chinese-immigration>.
- Mansfield, Erin, and Rebecca Morin. 2023. "Biden promised to address hate crime reporting. 20 months later, here's what's been done." USA Today. <https://www.usatoday.com/story/news/politics/2023/02/02/biden-aapi-hate-crime-bill/11106448002/>.
- McCarthy, Craig. 2022. "NYPD's failure to submit crime data to feds could cost NYC millions." New York Post. <https://nypost.com/2022/10/10/nypds-failure-to-submit-crime-data-to-feds-could-cost-nyc-millions/>.
- Melnitsky, Rebecca. 2023. "Fighting Hate: Addressing a Wave of Antisemitism, Anti-Asian Hate." New York State Bar Association. <https://nysba.org/fighting-hate-addressing-a-wave-of-antisemitism-anti-asian-hate/>.
- Meng, Grace. 2021. "Four Months After COVID-19 Hate Crimes Act Became Law, Meng and Hirono Ask DOJ For Updates on Implementation." Congresswoman Grace Meng. <https://meng.house.gov/media-center/press-releases/four-months-after-covid-19-hate-crimes-act-became-law-meng-and-hirono>.

- Monte, Lindsay M., and Hyon B. Shin. 2022. "Broad Diversity of Asian, Native Hawaiian, Pacific Islander Population." U.S. Census Bureau. <https://www.census.gov/library/stories/2022/05/aanhpi-population-diverse-geographically-dispersed.html>.
- Morrill, Aaron. 2023. "Jersey City PD Over Two Years Behind on Crime Reporting, Official." Jersey City Times. <https://jcitytimes.com/jersey-city-police-over-two-years-behind-on-crime-reporting-state-official/>.
- National Governors Association. n.d. "Governors' Powers & Authority." National Governors Association. Accessed January 30, 2024. <https://www.nga.org/governors/powers-and-authority/>.
- NYC Health. 2021. "El Departamento de Salud publica un extenso informe sobre la salud de los asiáticos e isleños del Pacífico." NYC.gov. <https://www.nyc.gov/site/doh/about/press/pr2021/dohmh-releases-api-report.page>.
- NYC Human Rights. n.d. "Stop Asian Hate." NYC.gov. Accessed November 25, 2023. <https://www.nyc.gov/site/cchr/community/stop-asian-hate.page>.
- Office Of Governor. 2022. "California Distributes \$14 Million in "Stop the Hate" Funds to 80 Organizations to Combat Hate Incidents | California Governor." Gavin Newsom. <https://www.gov.ca.gov/2022/03/31/california-distributes-14-million-in-stop-the-hate-funds-to-80-organizations-to-combat-hate-incidents/>.
- Office of Justice Programs. 2023. "OJP Grants Aimed at Combatting Rise in Hate Crimes." Office of Justice Programs. <https://www.ojp.gov/news/ojp-blogs/ojp-grants-combatting-hate-crimes>.
- Office of Public Affairs. 2021. "Justice Department Will Award More Than \$21 Million to Prevent and Respond to Hate Crimes." Department of Justice. <https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-will-award-more-21-million-prevent-and-respond-hate-crimes>.
- Office Of Public Affairs. 2023. "Director Rachel Rossi of the Office for Access to Justice Delivers Remarks at the Legal Aid Listening Session." Department of Justice. <https://www.justice.gov/opa/speech/director-rachel-rossi-office-access-justice-delivers-remarks-legal-aid-listening-session>.
- Office of The Attorney General. 2023. "Racial Justice Initiative, Now in Its Third Year, Continues to Expand Across New Jersey's Department of Law and Public Safety - New Jersey Office of Attorney General." - New Jersey Office of Attorney General. <https://www.njoag.gov/racial-justice-initiative-now-in-its-third-year-continues-to-expand-across-new-jerseys-department-of-law-and-public-safety/>.
- Reja, Mishal. 2021. "Trump's 'Chinese Virus' tweet helped lead to rise in racist anti-Asian Twitter content: Study." ABC News. <https://abcnews.go.com/Health/trumps-chinese-virus-tweet-helped-lead-rise-racist/story?id=76530148>.
- Rosenfeld, Alexi J., Weihua Li, Jamiles Lartey, Mark Puente, Terri Troncale, Maurice Chammah, Katie Park, et al. 2022. "The Problem With The FBI's Missing Crime Data." The Marshall Project. <https://www.themarshallproject.org/2022/10/08/the-problem-with-the-fbi-s-missing-crime-data>.
- Rotuno, Michelle. 2023. "220 NJ Hate Crimes Reported In Updated FBI Data." Patch. <https://patch.com/new-jersey/across-nj/220-nj-hate-crimes-reported-updated-fbi-data>.
- Sandler, Rachel. 2020. "Trump Abruptly Stops Calling Coronavirus 'Chinese Virus' At Daily Press Briefing." Forbes.

- <https://www.forbes.com/sites/rachelsandler/2020/03/23/trump-abruptly-stops-calling-coronavirus-chinese-virus-at-daily-press-briefing/>.
- Smith, Allan. 2020. "Trump declares himself 'immune' to Covid-19. His doctors won't say when he last tested negative." NBC News. <https://www.nbcnews.com/politics/2020-election/trump-declares-himself-immune-covid-19-his-doctors-won-t-n1242851>.
- Sonnenberg, Rhonda. 2022. "One Year Later: COVID-19 Hate Crimes Act a promising work in progress." Southern Poverty Law Center. <https://www.splcenter.org/news/2022/05/20/one-year-later-covid-19-hate-crimes-act-promising-work-progress>.
- State of California Department of Justice Attorney General. 2023. "Attorney General Bonta Releases 2022 Hate Crime Report, Highlights Continued Efforts to Combat Hate." California Department of Justice. <https://oag.ca.gov/news/press-releases/attorney-general-bonta-releases-2022-hate-crime-report-highlights-continued>.
- State of California Department of Justice Office of The Attorney General. n.d. "Hate Crimes | State of California - Department of Justice - Office of the Attorney General." California Department of Justice. Accessed December 18, 2023. <https://oag.ca.gov/hatecrimes>.
- State of California Department of Justice Office of The Attorney General. 2023. "Attorney General Bonta Releases 2022 Hate Crime Report, Highlights Continued Efforts to Combat Hate." California Department of Justice. <https://oag.ca.gov/news/press-releases/attorney-general-bonta-releases-2022-hate-crime-report-highlights-continued>.
- State of New Jersey. 2022. "Office of the Governor | Governor Murphy Signs Legislation Ensuring AAPI-Inclusive Curriculum is Taught in New Jersey Schools." NJ.gov. <https://www.nj.gov/governor/news/news/562022/20220118c.shtml>.
- Stopaapihate. 2021. "Statement on House Passage of the COVID-19 Hate Crimes Act." Stop AAPI Hate. <https://stopaapihate.org/2021/05/18/statement-on-house-passage-of-the-covid-19-hate-crimes-act/>.
- Strachan, Steven D. 2023. "Crime is up, and number of officers down, in 2022 Crime in Washington Report." The Leavenworth Echo. <https://www.leavenworthecho.com/press-releases/crime-and-number-officers-down-2022-crime-washington-report>.
- The Arc California. n.d. "California Launches New Hotline to Report Hate Crimes." The Arc of California. Accessed December 4, 2023. <https://thearcca.org/california-launches-new-hotline-to-report-hate-crimes/>.
- The White House. 2021. "Remarks by President Biden at Signing of the COVID-19 Hate Crimes Act." The White House. <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2021/05/20/remarks-by-president-biden-at-signing-of-the-covid-19-hate-crimes-act/>.
- The White House. 2022. "FACT SHEET: Biden-Harris Administration Advances Equity and Opportunity for Asian American, Native Hawaiian, and Pacific Islander Communities Across the Country." The White House. <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/01/20/fact-sheet-biden-harris-administration-advances-equity-and-opportunity-for-asian-american-native-hawaiian-and-pacific-islander-communities-across-the-country/>.

- The White House. 2022. “FACT SHEET: Biden-Harris Administration Advances Equity and Opportunity for Asian American, Native Hawaiian, and Pacific Islander Communities Across the Country.” The White House. <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/01/20/fact-sheet-biden-harris-administration-advances-equity-and-opportunity-for-asian-american-native-hawaiian-and-pacific-islander-communities-across-the-country/>.
- The White House. 2022. “FACT SHEET: Biden-Harris Administration Announces American Rescue Plan’s Historic Investments in Community Health Workforce.” The White House. <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/09/30/fact-sheet-biden-harris-administration-announces-american-rescue-plans-historic-investments-in-community-health-workforce/>.
- The White House. 2023. “FACT SHEET: The Biden-Harris Administration Advances Equity and Opportunity for Asian American, Native Hawaiian, and Pacific Islander Communities Across the Country.” The White House. <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/05/31/fact-sheet-the-biden-harris-administration-advances-equity-and-opportunity-for-asian-american-native-hawaiian-and-pacific-islander-communities-across-the-country/>.
- The White House. 2023. “FACT SHEET: Biden-Harris Administration Takes Action to Promote Access to Behavioral Health Care for Asian American, Native Hawaiian, and Pacific Islander Communities.” The White House. <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/07/26/fact-sheet-biden-harris-administration-takes-action-to-promote-access-to-behavioral-health-care-for-asian-american-native-hawaiian-and-pacific-islander-communities/>.
- The White House. 2023. “FACT SHEET: Biden-Harris Administration Continues to Counter Hate-Fueled Violence.” The White House. <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/09/15/fact-sheet-biden-harris-administration-continues-to-counter-hate-fueled-violence/>.
- The White House. 2023. “FACT SHEET: Biden-Harris Administration Continues to Uplift Asian American, Native Hawaiian, and Pacific Islander Communities.” The White House. <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/01/17/fact-sheet-biden-harris-administration-continues-to-uplift-asian-american-native-hawaiian-and-pacific-islander-communities/>.
- United State Department of State. n.d. “Milestones: 1866–1898 - Office of the Historian.” Milestones: 1866–1898 - Office of the Historian. Accessed March 17, 2023. <https://history.state.gov/milestones/1866-1898/chinese-immigration>.
- U.S. Department of Health and Human Services. 2022. “Remarks by HHS Deputy Secretary Palm at the One-Year Anniversary of the COVID-19 Hate Crimes Act.” HHS.gov. <https://www.hhs.gov/about/news/2022/05/20/remarks-by-hhs-deputy-secretary-palm-at-the-one-year-anniversary-covid-19-hate-crimes-act.html>.
- U.S. Department of Health and Human Services. 2022. “DOJ, Joined by HHS, Announce New Initiatives to Address and Prevent Hate Crimes and Hate Incidents.” HHS.gov. <https://www.hhs.gov/about/news/2022/05/20/justice-department-announces-new-initiatives-address-prevent-hate-crimes-hate-incidents.html>.
- U.S. Department of Justice. 2021. “Justice Department Will Award More Than \$21 Million to Prevent and Respond to Hate Crimes.” Department of Justice. <https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-will-award-more-21-million-prevent-and-respond-hate-crimes>.

- U.S. Department of Justice. 2023. "Hate Crimes | Fact Sheet: Justice Department Efforts to Combat Hate Crimes." Department of Justice. <https://www.justice.gov/hatecrimes/spotlight/combating-hate-crimes>.
- U.S. Department of Justice. 2023. "Hate Crimes | Fact Sheet: Justice Department Efforts to Combat Hate Crimes." Department of Justice. <https://www.justice.gov/hatecrimes/spotlight/combating-hate-crimes>.
- U.S. Department of Justice. 2023. "Hate Crimes | Fact Sheet: Justice Department Efforts to Combat Hate Crimes." Department of Justice. <https://www.justice.gov/hatecrimes/spotlight/combating-hate-crimes>.
- U.S. Department of Justice. 2023. "Justice Department Leaders Join Maryland Attorney General to Announce Hate Crime Grants." Department of Justice. <https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-leaders-join-maryland-attorney-general-announce-hate-crime-grants>.
- Vazquez, Maegan. 2021. "Biden signs bill aimed at addressing rise in anti-Asian hate crimes." CNN. <https://edition.cnn.com/2021/05/20/politics/biden-anti-asian-hate-crimes-covid-19-signing/index.html>.
- Venkatraman, Sakshi. 2023. "Chinese citizens in Texas are incensed over a proposal to ban them from buying property in the state." NBC News. <https://www.nbcnews.com/news/asian-america/chinese-citizens-texas-are-incensed-proposal-ban-buying-property-state-rcna70836>.
- Washington State Department of Commerce. 2021. "Governor Inslee's Statements Addressing Anti-Asian Violence - Washington State Department of Commerce." Washington State Department of Commerce. <https://www.commerce.wa.gov/ocva-updates/governor-inslees-statements-addressing-anti-asian-violence/>.
- Wibisono, Anton. 2019. "Memahami Metode Penelitian Kualitatif." DJKN. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12773/Memahami-Metode-Penelitian-Kualitatif.html>.
- Yam, Kimmy. 2022. "Anti-Asian hate crimes increased 339 percent nationwide last year, report says." NBC News. <https://www.nbcnews.com/news/asian-america/anti-asian-hate-crimes-increased-339-percent-nationwide-last-year-repo-rcna14282>.
- Yoon, Alexandra. 2023. "King County zeros in on how the proposed hate-crime hotline would work." The Seattle Times. <https://www.seattletimes.com/seattle-news/law-justice/king-county-zeros-in-on-how-proposed-hate-crime-hotline-would-work/>.
- Zhao, Jun, Justine E. Tinkler, and Kristen A. Clayton. 2022. "Assessing the Casual Link between the Covid-19 Pandemic and Racial Discrimination." *Sage Journal* Vol. 8 (April).
- Zhou, Naaman. 2020. "Asian Australians threatened and spat on in racist incidents amid coronavirus." The Guardian. <https://www.theguardian.com/australia-news/2020/jul/24/asian-australians-threatened-and-spat-on-in-racist-incident-amid-coronavirus>.

